



2025 LAPORAN TAHUNAN

**Balai Riset Perikanan Budidaya Air
Tawar dan Penyuluhan Perikanan**

SAMBUTAN KEPALA BALAI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kegiatan Tahun 2025 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dapat terselesaikan dengan baik. Laporan kegiatan tahunan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai atas dasar rencana yang telah disusun sebelumnya oleh BRPBATPP pada tahun anggaran 2025. BRPBATPP merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penyuluhan.

Laporan Kegiatan Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Laporan ini juga sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkup BRPBATPP serta sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan BRPBATPP selama tahun anggaran 2025 sebagai organisasi di bidang penyuluhan perikanan, selain itu diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Bogor, 2 Januari 2026

Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar
dan Penyuluhan Perikanan



Dr.R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi,S.Pi. M.Si.
NIP. 19751216 200312 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Kepala Balai.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	lii
Daftar Gambar.....	v
Pendahuluan.....	i
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	2
1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	7
1.5. Rencana Kerja Tahun 2025.....	9
1.6. Sistematika Pelaporan.....	16
Pelaksanaan Kegiatan.....	18
2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	18
2.2. Pelaksanaan Kegiatan Indikator Kinerja Utama BRPBATPP.....	21
2.3. Pelaksanaan Kegiatan Indikator Kinerja Manajerial BRPBATPP.....	43
2.4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Lingkup BRPBATPP.....	62
2.5. Kegiatan Pelayanan Publik Lingkup BRPBATPP.....	70
2.6. Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Lingkup BRPBATPP.....	75
Permasalahan dan Rekomendasi.....	79
3.1. Permasalahan.....	79
3.2. Rekomendasi.....	79
Penutup.....	81

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai BRPBATPP Tahun 2025.....	3
Tabel 1.2.	Keragaan Sumber Daya Manusia BRPBATPP Tahun 2025.....	4
Tabel 1.3.	Aset BRPBATPP s/d Akhir Tahun 2025.....	7
Tabel 1.4.	Perjanjian Kinerja antara BRPBATPP dan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025.....	9
Tabel 1.5.	Revisi Perjanjian Kinerja antara BRPBATPP dan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025.....	12
Tabel 1.6.	Revisi Anggaran BRPBATPP Tahun 2025.....	14
Tabel 1.7.	Revisi DIPA BRPBATPP Tahun 2025.....	15
Tabel 2.1.	Pagu Anggaran Awal dan Pagu Setelah Revisi DIPA BRPBATPP Tahun 2025.....	19
Tabel 2.2.	Target Output, Pagu Anggaran, dan Realisasi Tahun 2025.....	20
Tabel 2.3.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama BRPBATPP Tahun 2025.....	22
Tabel 2.4.	Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025.....	25
Tabel 2.5.	Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2025.....	25
Tabel 2.6.	Gender Ketua Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025.....	26
Tabel 2.7.	Gender Ketua Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2025.....	26
Tabel 2.8.	Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025.....	28
Tabel 2.9.	Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2025.....	29
Tabel 2.10.	Gender Ketua Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025.....	30
Tabel 2.11.	Gender Ketua Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2025.....	30
Tabel 2.12.	Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Dibentuk Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025.....	31
Tabel 2.13.	Gender Anggota Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Dibentuk Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025.....	32
Tabel 2.14.	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan Tahun 2025.....	33
Tabel 2.15.	Gender Ketua Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Tahun 2025.....	33
Tabel 2.16.	Rekap Penerimaan PNPB BRPBATPP Tahun 2025.....	38
Tabel 2.17.	Penerimaan PNPB BRPBATPP per Akun Tahun 2025.....	39
Tabel 2.18.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Manajerial BRPBATPP Tahun 2025.....	43
Tabel 2.19.	Kemitraan dan Inisiasi Kemitraan yang Dilaksanakan BRPBATPP Tahun 2025.....	44
Tabel 2.20.	Kategori Nilai SAKIP.....	51
Tabel 2.21.	Hasil Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP Tahun 2025.....	51
Tabel 2.22.	Rekap Dokumen Pendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan	

	Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP Tahun 2025.....	60
Tabel 2.23.	Koleksi Ikan Air Tawar pada Instalasi Perikanan BRPBATPP Tahun 2025.....	61
Tabel 2.24.	Identifikasi dan Penetapan Jenis Usaha Budidaya Ikan Air Tawar pada Instalasi BRPBATPP Tahun 2025.....	62
Tabel 2.25.	Peserta Tridharma Perguruan Tinggi (Magang / PKL / PA / MBKM / Penelitian) di Instalasi BRPBATPP Tahun 2025.....	64
Tabel 2.26.	Kegiatan Workshop di Instalasi Cijeruk Tahun 2025.....	66
Tabel 2.27.	Pelaksanaan Percontohan Penyuluhan BRPBATPP Tahun 2025.....	67
Tabel 2.28.	Rekap Permasalahan dan Rekomendasi pada Kegiatan Instalasi BRPBATPP Tahun 2025.....	68
Tabel 2.29.	Rekapitulasi Peserta Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian Tahun 2025 di BRPBATPP.....	71
Tabel 2.30.	Rekapitulasi <i>Jenis Informasi Publik dan Jumlah Pemohon ke PPID</i> BRPBATPP Tahun 2025.....	73
Tabel 2.31.	Rekapitulasi Publikasi BRPBATPP Tahun 2025.....	75

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi BRPBATPP.....	3
Gambar 2.1.	Profil Kegiatan BRPBATPP Tahun 2025.....	18
Gambar 2.2.	Pagu Anggaran BRPBATPP Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	20
Gambar 2.3.	Pagu dan Realisasi Anggaran BRPBATPP per Jenis Belanja Tahun 2025.	21
Gambar 2.4.	Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Tahun 2025.....	37
Gambar 2.5.	Dashboard SIDAK BRPBATPP Tahun 2025.....	47
Gambar 2.6.	Nilai IKPA BRPBATPP Tahun 2025.....	49
Gambar 2.7.	Screenshot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP pada Aplikasi Monev Kemenkeu Tahun 2025.....	53
Gambar 2.8.	Screenshot Capaian IP ASN BRPBATPP Tahun 2025.....	55
Gambar 2.9.	Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Magang / PKL / PA / MBKM / Penelitian) di Instalasi BRPBATPP Tahun 2025.....	65
Gambar 2.10.	Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Percontohan Penyuluhan di Instalasi BRPBATPP Tahun 2025.....	67
Gambar 2.11.	Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kerja/Studi Tiru/Audiensi Tahun 2025.....	70
Gambar 2.12.	Dokumentasi Kegiatan Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian Tahun 2025 di BRPBATPP.....	71
Gambar 2.13.	Persentase Jumlah Peserta Magang/Praktik Berdasarkan Gender Tahun 2025.....	72
Gambar 2.14.	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik di BRPBATPP Tahun 2025..	74
Gambar 2.15.	Pemberian Penghargaan Kearsipan Lingkup KKP kepada BRPBATPP.....	76
Gambar 2.16.	Rapat Penilaian Arsip Usul Musnah dan Usul Serah serta Pemeriksaan Arsip Usul Musnah Tahun 2025.....	77
Gambar 2.17.	Pemeriksaan Arsip Usul Serah BRPBATPP Tahun 2025.....	78
Gambar 2.18.	Pemusnahan Arsip BRPBATPP Tahun 2025.....	78

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut mencerminkan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara maju yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia ditempatkan sebagai prioritas utama yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan bangsa ditengah perubahan global yang cepat.

Sebagai Kementerian yang memiliki mandat strategis, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian visi nasional tersebut. Visi KKP 2025-2029 adalah *“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Sedangkan visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) yaitu *“Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing.”* Visi tersebut menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan. SDM yang inovatif akan mendorong lahirnya kreativitas serta adaptasi terhadap dinamika perubahan; SDM yang kompeten memastikan relevansi keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA); sedangkan SDM yang berdaya saing memperkuat posisi Indonesia dalam arena global yang sarat kompetisi.

BRPBATPP yang merupakan salah satu UPT dari BPPSDM KP memiliki fungsi riset dan penyuluhan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRPBATPP. Namun dengan beralihnya tugas pokok dan fungsi riset ke BRIN, BRPBATPP hanya menyelenggarakan fungsi penyuluhan yang meliputi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Selanjutnya BRPBATPP melaksanakan fungsinya tersebut untuk mendukung visi dan misi KKP yang kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bagian BRPBATPP. Pada tahun 2025, BRPBATPP melaksanakan 2 (dua) program yaitu: (1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta (2) Program Dukungan Manajemen. Program ini dilaksanakan oleh segenap bagian BRPBATPP selama tahun berjalan dan selanjutnya disusun ke dalam laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung program tersebut.

1.2. Tujuan

Laporan Kegiatan BRPBATPP Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi beberapa tujuan, yaitu :

1. Menginformasikan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2025;
2. Sebagai sarana evaluasi kegiatan di lingkup BRPBATPP dalam rangka perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

BRPBATPP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No : 74/PERMEN-KP/2020 adalah UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan. BRPBATPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BRPBATPP yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan. Dalam menjalankan tugasnya, BRPBATPP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan;
2. Pelaksanaan riset perikanan budidaya air tawar dibidang perbenihan dan genetik populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
3. Pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
4. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

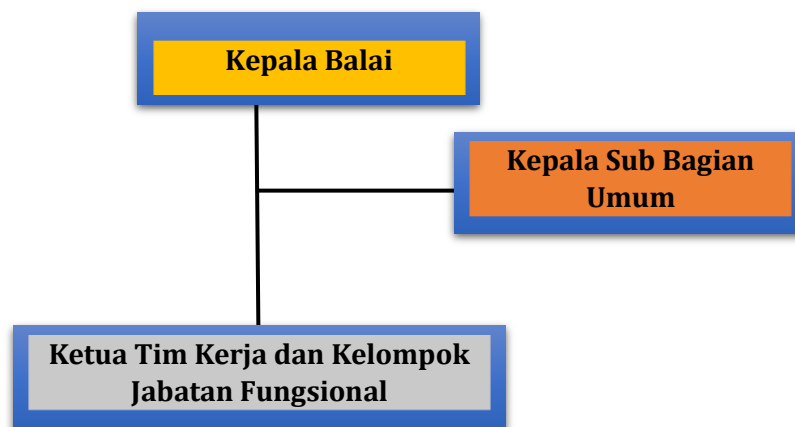
5. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Namun, karena adanya peralihan peneliti dan teknisi ke BRIN, maka tugas dan fungsi BRPBATPP mengalami perubahan yaitu pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan penyuluhan.

BRPBATPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BRPBATPP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi BRPBATPP berdasarkan Permen KP No.74/PERMEN-KP/2020.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BRPBATPP

Dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta kegiatan manajerial, BRPBATPP memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, PJLP dan outsourcing sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai BRPBATPP Tahun 2025

No.	Unit Kerja	ASN (Aparatur Sipil Negara) (Orang)			PJLP	Outsourcing	Jumlah
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu			
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor (Sempur)	30	10	1	4	6	51
2.	Instalasi Riset Plasma Nutfah Budidaya Air Tawar, Cijeruk	5	9	1	2	6	23
3.	Instalasi Riset Lingkungan Perikanan & Toksikologi, Ciblagung	7	3	1	2	6	19
4.	Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan, Depok	-	1	3	-	6	10
5.	Penyuluh Perikanan (78 Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta)	292	353	9	-	-	654
Total		334	376	15	8	24	757

Sumber: Data Kepegawaian BRPBATPP Tahun 2025

Dalam rangka reformasi birokrasi yang turut dilaksanakan oleh KKP, BRPBATPP juga tidak terlepas dari program transformasi pejabat birokrasi menjadi pejabat fungsional tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas ASN sesuai dengan jabatan fungsional tertentu yang diembannya. Keragaan sumber daya manusia yang ada di BRPBATPP tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Keragaan Sumber Daya Manusia BRPBATPP Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
I.	Berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional dan Non Fungsional		
1	Kepala Balai	1	0,14
2	Kasubbag Umum	1	0,14
3	Instruktur	1	0,14
4	Penyuluh Perikanan (PNS)	292	40,28
5	Penyuluh Perikanan (PPPK)	376	51,86
6	Pustakawan	1	0,14
7	Perencana	2	0,28
8	Arsiparis	2	0,28
9	Analisis SDM Aparatur	3	0,41

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	0,28
11	Pranata Keuangan APBN	2	0,28
12	Pranata Hubungan Masyarakat	1	0,14
13	Fungsional Umum	26	3,59
14	PPPK Paruh Waktu	15	2,07
15	Kepala Balai	1	0,14
Total		725	100,00
II.	<i>Berdasarkan Jenjang Fungsional Penyuluh</i>		
1	Penyuluh Perikanan Madya	43	6,83
2	Penyuluh Perikanan Muda	150	23,81
3	Penyuluh Perikanan Pertama	334	53,02
4	Penyuluh Perikanan Penyelia	14	2,22
5	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	26	4,13
6	Penyuluh Perikanan Pelaksana/Terampil	63	10,00
Total		630	100,00
III.	<i>Berdasarkan Jenjang Fungsional Pustakawan</i>		
1	Pustakawan Muda	1	100,00
2	Pustakawan Pertama	0	-
Total		1	100,00
IV.	<i>Berdasarkan Jenjang Fungsional Perencana</i>		
1	Perencana Ahli Muda	1	50,00
2	Perencana Ahli Pertama	1	50,00
Total		2	100,00
V.	<i>Berdasarkan Jenjang Fungsional Analisis SDM Aparatur</i>		
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	33,33
2	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	2	66,67
Total		3	100,00
VI.	<i>Berdasarkan Jenjang Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN</i>		
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	50,00
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	50,00
Total		2	100,00
VII.	<i>Berdasarkan Jenjang Fungsional Pranata Keuangan APBN</i>		
1	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	50,00
2	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	50,00
Total		2	100,00

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
VIII.	<i>Berdasarkan Jenjang Fungsional Pranata Humas</i>		
1	Pranata Humas Ahli Muda	1	100,00
2	Pranata Humas Ahli Pertama	0	-
Total		1	100,00
IX.	<i>Berdasarkan Jenjang Fungsional Arsiparis</i>		
1	Arsiparis Ahli Muda	1	50,00
2	Arsiparis Ahli Pertama	1	50,00
Total		2	100,00
X.	<i>Berdasarkan Jenjang Fungsional Instruktur</i>		
1	Instruktur Muda	0	-
2	Instruktur Pertama	1	100,00
Total		1	100,00
XI.	<i>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>		
1	S3	3	0,41
2	S2	41	5,66
3	S1	379	52,28
4	D4	175	24,14
5	D3	92	12,69
6	SMA	31	4,28
7	SMP	1	0,14
8	SD	3	0,41
Total		725	100,00
XII.	<i>Berdasarkan Golongan</i>		
1	Golongan I	2	0,28
2	Golongan II	33	4,55
3	Golongan III	253	34,90
4	Golongan IV	48	6,62
5	Golongan V	2	0,28
6	Golongan IX	333	45,93
7	Golongan VII	39	5,38
8	PPPK Paruh Waktu	15	2,07
Total		725	100,00
XIII.	<i>Berdasarkan Kelompok Umur</i>		
1	≤25	1	0,14

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
2	25 - 35 tahun	185	25,52
3	36 – 45 tahun	374	51,59
4	46 – 55 tahun	132	18,21
5	≥56 tahun	22	3,03
6	≥ 58 tahun	11	1,52
Total		725	100,00
XIV.	<i>Berdasarkan Jenis Kelamin</i>		
1	Laki-laki	403	55,59
2	Perempuan	322	44,41
Total		725	100,00

Sumber : diolah dari data kepegawaian BRPBATPP Triwulan IV Tahun 2025

1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana pendukung untuk kegiatan BRPBATPP antara lain tanah, bangunan kantor, *hatchery* dan kolam percobaan untuk menghasilkan teknologi budidaya air tawar yang aplikatif dan efisien, ruang pertemuan, perpustakaan, serta laboratorium terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Beberapa laboratorium yang dimiliki oleh BRPBATPP antara lain adalah : (1) Lab Reproduksi dan Genetika Ikan, (2) Lab Nutrisi dan Teknologi Pakan, (3) Lab Lingkungan dan Toksikologi, dan (4) Lab Kesehatan Ikan. Beberapa aset yang dimiliki oleh BRPBATPP pada tahun 2025 terlihat pada tabel berikut.

Tabel1.3. Aset BRPBATPP s/d Akhir Tahun 2025

NO.	NAMA ASET	KUANTITAS	NILAI (RP.)
A	TANAH		95.685.186.000
1	Tanah Persil (m ²)	16.345	52.488.531.000
2	Tanah Non Persil (m ²)	35.940	43.196.655.000
B	PERALATAN DAN MESIN		34.344.564.801
1	Alat Besar Darat (Unit)	3	339.040.934
2	Alat Bantu (Unit)	68	209.301.424
3	Alat Angkutan Darat Bermotor (Unit)	9	1.860.647.242
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Unit)	3	2.117.663
5	Alat Bengkel Bermesin (Unit)	1	981.200

NO.	NAMA ASET	KUANTITAS	NILAI (RP.)
6	Alat Ukur (Unit)	41	199.469.959
7	Alat Pengolahan (Unit)	341	771.834.302
8	Alat Kantor (Unit)	220	972.453.490
9	Alat Rumah Tangga (Unit)	1.969	3.896.035.737
10	Alat Studio (Unit)	25	196.202.905
11	Alat Komunikasi (Unit)	2	5.420.000
12	Peralatan Pemancar (Unit)	8	1.027.396.014
13	Alat Kedokteran (Unit)	34	1.300.038.459
14	Unit Alat Laboratorium (Unit)	577	20.636.906.373
15	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir (Unit)	22	1.011.246.633
16	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika (Unit)	6	160.949.660
17	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	28	365.462.573
18	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica (Unit)	1	12.635.000
19	Laboratorium Alat Standarisasi Kalibrasi (Unit)	7	81.376.102
20	Komputer Unit (Unit)	72	864.263.300
21	Peralatan Komputer (Unit)	52	222.861.323
22	Alat Kerja Penerbangan (Unit)	3	27.520.000
23	Unit Peralatan Proses/Produksi (Unit)	42	180.404.508
C	GEDUNG DAN BANGUNAN		41.465.485.500
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja (Unit)	94	38.633.950.500
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal (Unit)	6	845.788.000
3	Tugu/Tanda Batas (Unit)	7	1.985.747.000
D	JALAN DAN JEMBATAN		381.691.000
1	Jalan (Unit)	1.887	245.882.000
2	Jembatan (Unit)	30	135.809.000
E	IRIGASI		662.585.000
1	Bangunan Air Irigasi (Unit)	17	468.489.000
2	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan (Unit)	2	32.319.000
3	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Tanah (Unit)	2	157.784.000
4	Bangunan Air Bersih/Air Baku (Unit)	1	3.993.000
F	JARINGAN		1.007.968.320
1	Instalasi Air Bersih/Air Baku (Unit)	1	49.939.700
2	Instalasi Gardu Listrik (Unit)	2	328.572.170
3	Instalasi Gas (Unit)	1	5.055.000

NO.	NAMA ASET	KUANTITAS	NILAI (RP.)
4	Jaringan Listrik (Unit)	2	624.401.450
G	ASET TETAP LAINNYA		275.652.000
1	Bahan Perpustakaan Tercetak (Unit)	375	250.652.000
2	Alat Bercorak Kebudayaan (Unit)	1	25.000.000
H	ASET TAK BERWUJUD		126.467.500
1	Paten	2	126.467.500
TOTAL			173.949.600.121

Sumber: Data BMN BRPBATPP Per 31 Desember Tahun 2025

1.5. Rencana Kerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, BRPBATPP telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Perjanjian kinerja ini memuat kegiatan/sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan (IKK) dan target indikator kinerja kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai rencana kinerja yang telah diperjanjikan tersebut didukung oleh anggaran yang tertuang di dalam DIPA dan RKAKL BRPBATPP TA 2025.

Dengan terbitnya Permen KP No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) yang hanya terdapat 5 (lima) Eselon II dilingkup BPPSDMKP, yaitu (1) Sekretariat BPPSDMKP; (2) Pusat Penyuluhan KP, (3) Pusat Pendidikan KP, (4) Pusat Pelatihan KP dan (5) Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia KP.

BRPBATPP karena memiliki tugas pokok dan fungsi kegiatan penyuluhan sehingga berada di bawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Perjanjian kinerja awal dan revisi antara BRPBATPP dengan Pusat Penyuluhan TA 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Perjanjian Kinerja antara BRPBATPP dan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Target (Awal)	No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (Revisi)
Kegiatan 1. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	5.665	1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh	4.800

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Target (Awal)	No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (Revisi)
							BRPBATPP (Kelompok)	
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	248	2		Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	248
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	911	3		Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	889
		4	Nilai PNBP Satker BRPBATPP (Rupiah Milyar)	0,0928	4		Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBATPP (Unit)	43
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBATPP (Unit)	43	5		Nilai PNBP Satker BRPBATPP (Rupiah Milyar)	0,0928
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BRPBATPP (Paket)	1	6		Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BRPBATPP (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	7	7		Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	3
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBATPP (Orang)	14	8		Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBATPP (Orang)	14

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator	Target (Awal)	No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (Revisi)
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBATPP (Dokumen)	1	9	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPBATPP (Dokumen)	1
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)	85			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)	85
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)	92			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)	92
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP (Nilai)	81			Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP (Nilai)	81
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)	71,5			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)	71,5
		14	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	81			Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	81
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBATPP (%)	80			Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBATPP (%)	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBATPP (%)	80			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPBATPP (%)	80
		17	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100	17		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100

Keterangan : Indikator kinerja no 1, 3 dan 7 adalah indikator yang mengalami perubahan target

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2025 perjanjian kinerja awal antara BRPBATPP dan Pusat Penyuluhan KP memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dan 17

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Setelah mengalami revisi pada 11 Desember 2025, perjanjian kinerja memiliki 2 (*dua*) sasaran kegiatan dan 17 IKK yang harus dicapai sesuai target yang telah disepakati dengan Pusat Penyuluhan KP.

Selama Tahun 2025, perjanjian kinerja antara BRPBATPP dengan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025 telah mengalami 2 (*dua*) kali revisi seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.5. Revisi Perjanjian Kinerja antara BRPBATPP dan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025

No.	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
I. Revisi I			
1.	Pagu Anggaran	• Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP Rp. 4.077.606.000 • Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP Rp. 82.029.965.000 Total Pagu Anggaran Rp.86.107.571.000	• Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP Rp. 5.078.936.000 • Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP Rp. 82.029.965.000 Total Pagu Anggaran Rp.87.108.901.000
2.	Tanggal penandatanganan Perjanjian Kinerja	30 Januari 2025	14 April 2025
II. Revisi II			
1.	Anggaran	• Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP Rp.5.078.936.000 • Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP Rp.82.029.965.000 Total Pagu Anggaran Rp.87.108.901.000	• Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP Rp.4.033.400.000 • Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP Rp.95.962.638.000 Total Pagu Anggaran Rp.99.996.038.000
2.	Tanggal penandatanganan Perjanjian Kinerja	14 April 2025	11 Desember 2025
3.	Jumlah sasaran kegiatan	4 sasaran kegiatan: 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	2 sasaran kegiatan: 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

No.	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
		3. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
4.	Perubahan Target pada Indikator Kinerja	• Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP target 5.665 kelompok • Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP 911 kelompok • Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP 7 orang	• Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP menjadi 4.800 kelompok • Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok) menjadi 889 kelompok • Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP menjadi 3 orang
5.	Perubahan narasi indikator kinerja	1. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok) 2. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok) 3. Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok) 4. Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBATPP (Unit) 5. Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BRPBATPP (Paket)	1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP (Kelompok) 2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok) 3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok) 4. Gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBATPP (Unit) 5. Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BRPBATPP (Paket)

No.	Poin Perubahan	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
		6. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBATPP (Dokumen)	6. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPBATPP (Dokumen)

Dalam rangka mendukung pencapaian rencana kerja BRPBATPP Tahun 2025, BRPBATPP telah didukung oleh anggaran yang meliputi 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal Rp.86.107.571.000 yang terdiri dari :

- a) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran Rp.4.077.606.000.
- b) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran Rp.82.029.965.000.

Pada tanggal 9 April 2025 (DIPA revisi ke-4), anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.87.108.901.000 karena adanya penambahan pemenuhan honor PPB, honor PPNPN dan Langganan Daya dan Jasa. Pada tanggal 1 September November 2025 (DIPA revisi ke-7) pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.85.010.800.000 terkait pergeseran anggaran dan rekomposisi blokir efisiensi anggaran. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2025 (DIPA revisi ke-10) pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.99.996.038.000 terkait adanya penambahan belanja pegawai (gaji dan tunjangan) serta operasional dan pemeliharaan kantor. Berikut tabel yang menyajikan perubahan anggaran sampai dengan revisi terakhir Tahun 2025.

Tabel 1.6. Revisi Anggaran BRPBATPP Tahun 2025

No.	Program/Sasaran Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Revisi I (Rp.)	Anggaran Revisi II (Rp.)	Anggaran Revisi III (Rp.)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.077.606.000	5.078.936.000	4.033.400.000	4.033.400.000
	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4.077.606.000	5.078.936.000	4.033.400.000	4.033.400.000
2	Program Dukungan Manajemen	82.029.965.000	82.029.965.000	80.977.400.000	95.962.638.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82.029.965.000	82.029.965.000	80.977.400.000	95.962.638.000

No.	Program/Sasaran Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Revisi I (Rp.)	Anggaran Revisi II (Rp.)	Anggaran Revisi III (Rp.)
	Kelautan dan Perikanan				
	Total Anggaran BRPBATPP Tahun 2025	86.107.571.000	87.108.901.000	85.010.800.000	99.996.038.000

Sumber : DIPA dan RKAKL Awal BRPBATPP Tahun 2025, DIPA dan RKAKL Revisi ke-04 Tahun 2025, DIPA dan RKAKL Revisi ke-07, DIPA dan RKAKL Revisi ke-10

Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, BRPBATPP telah melakukan 11 kali revisi DIPA dalam rangka mendukung pencapaian rencana kerja BRPBATPP TA.2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7. Revisi DIPA BRPBATPP Tahun 2025

No.	DIPA	Tanggal Terbit DIPA / Revisi	Pagu (Rp.000)	Blokir (Rp.000)	Keterangan
1.	Awal	2 Desember 2024	86.107.571	78.132	Surat Menteri Keuangan No. S-1023/MK.02/2024, tanggal 7 November 2024, hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024
2.	Revisi ke 01	4 Februari 2025	86.107.571	78.132	Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I
3.	Revisi ke 02	21 Februari 2025	86.107.571	6.239.824	Surat Menteri Keuangan No. S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam pelaksanaan APBN TA 2025 dan Nota Dinas Sekjen KKP No. 256/SJ/RC.420/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Tindak Lanjut Usulan Efisiensi Anggaran Belanja KKP TA 2025
4.	Revisi ke 03	20 Maret 2025	86.107.571	4.976.024	Revisi rekomposisi blokir efisiensi anggaran dalam rangka pemenuhan honor Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)
5.	Revisi ke 04	9 April 2025	87.108.901	2.098.101	Surat Kepala BPPSDMKP No. B.796/BPPSDM/RC.420/III/2025 , tanggal 27 Maret 2025, hal Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025

No.	DIPA	Tanggal Terbit DIPA / Revisi	Pagu (Rp.000)	Blokir (Rp.000)	Keterangan
6.	Revisi ke 05	16 April 2025	87.108.901	2.098.101	Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II
7.	Revisi ke 06	7 Juli 2025	87.108.901	2.098.101	Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III
8.	Revisi ke 07	1 September 2025	85.010.800	-	Revisi buka blokir dan pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi Sarpras Pendidikan KP
9.	Revisi ke 08	6 Oktober 2025	85.010.800	-	Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan IV
10.	Revisi ke 09	16 Oktober 2025	85.010.800	-	Revisi Pemutahiran POK (pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan uang makan dan tunjangan kinerja PPPK)
11.	Revisi ke 10	19 November 2025	99.996.038	-	Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.1213/MENKP/XI/2025 tanggal 11 November 2025 dan Surat BPPSDMKP No. B.2281/BPPSDM/RC.420/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025, hal Usulan Revisi Belanja Gaji Pegawai BPPSDM KP
12.	Revisi ke 11	12 Desember 2025	99.996.038	-	Revisi Pemutahiran POK (pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan uang makan serta pemeliharaan dan operasional perkantoran)

Sumber: DIPA dan RKAKL BRPBATPP Tahun 2025

1.6. Sistematika Pelaporan

Laporan Kegiatan BRPBATPP Tahun 2025 ini bertujuan untuk menginformasikan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2025. Sistematika penyajian laporan kegiatan BRPBATPP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tujuan, struktur organisasi dan sumberdaya manusia, sumberdaya sarana prasarana, dan sistematika pelaporan;
- **Bab II Pelaksanaan Kegiatan**, menyajikan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 yang terdiri dari kegiatan prioritas, prioritas lainnya, dan capaian positif lainnya;

- **Bab III Permasalahan dan Rekomendasi**, menyajikan permasalahan pada pelaksanaan kegiatan yang dihadapi di tahun 2025 beserta rekomendasinya;
- **Bab IV Penutup**, menyajikan kesimpulan terhadap pelaksanaan kegiatan TA.2025;
- **Lampiran-lampiran**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 program kegiatan, yaitu:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Dukungan Manajemen



Gambar 2.1. Profil Kegiatan BRPBATPP Tahun 2025

Dari kedua program tersebut kemudian terbagi menjadi aktivitas/kegiatan, klasifikasi rincian output maupun rincian output yang memiliki pagu anggaran masing-masing. Pada tahun 2025 ini, BRPBATPP telah melakukan 11 kali revisi DIPA terkait dengan perubahan di halaman III DIPA, pemutakhiran POK, pencatatan pagu pemanfaatan PNPB lingkup BRPBATPP TA 2025, maupun revisi penambahan anggaran belanja pegawai. Berikut ini pagu anggaran BRPBATPP

berdasarkan DIPA awal dan setelah dilakukan revisi ke-11.

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Awal dan Pagu Setelah Revisi DIPA BRPBATPP Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen /Subkomp/Detail	Pagu Anggaran (Rp.000)			
		Awal	%	Revisi ke-11	%
I.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.077.606	4,74	4.033.400	4,03
	A. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4.077.606	4,74	4.033.400	4,03
	1. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (KRO-Orang)	7.000	0,01	-	0,00
	- Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	7.000	0,01	-	0,00
	2. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (KRO-Kelompok masyarakat)	4.070.606	4,73	4.033.400	4,03
	- Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	4.070.606	4,73	4.033.400	4,03
II.	Program Dukungan Manajemen	82.029.965	95,26	95.962.638	95,97
	A. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	82.029.965	95,26	95.962.638	95,97
	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (KRO-4 Layanan)	81.974.965	95,20	95.962.038	95,97
	- Layanan BMN	10.000	0,01	600	0,0006
	- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	15.000	0,02	450	0,0005
	- Layanan Umum	20.000	0,02	17.480	0,02
	- Layanan Perkantoran	81.929.965	95,15	95.943.508	95,95
	2. Layanan Manajemen SDM Internal (KRO-1 Layanan)	10.000	0,01	-	0,00
	- Layanan Manajemen SDM	10.000	0,01	-	0,00
	3. Layanan Manajemen Kinerja internal (KRO-4 Layanan)	45.000	0,05	600	0,0006
	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10.000	0,01	-	0,00
	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15.000	0,02	-	0,00
	- Layanan Manajemen Keuangan	15.000	0,02	600	0,0006
	- Layanan Kearsipan	5.000	0,01	-	0,00
	Total Anggaran	86.107.571	100,00	99.996.038	100,00

Sumber: DIPA dan RKAKL Awal BRPBATPP Tahun 2025 dan DIPA dan RKAKL Revisi ke-11

Postur anggaran BRPBATPP terbagi menjadi belanja pegawai dan belanja barang. Apabila dilihat per jenis belanja berdasarkan pagu revisi ke-11 terlihat bahwa 89,00% dari total pagu anggaran untuk kegiatan belanja pegawai (gaji, tunjangan dan uang makan), sedangkan 11,00% dari total pagu anggaran untuk belanja barang. Pagu anggaran BRPBATPP per jenis belanja TA. 2025 setelah revisi ke-11 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Pagu Anggaran BRPBATPP Per Jenis Belanja Tahun 2025

Sesuai dengan dokumen RKAKL BRPBATPP tahun 2025, terdapat target output beserta realisasi anggaran yang harus dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Target Output, Pagu Anggaran, dan Realisasi Tahun 2025

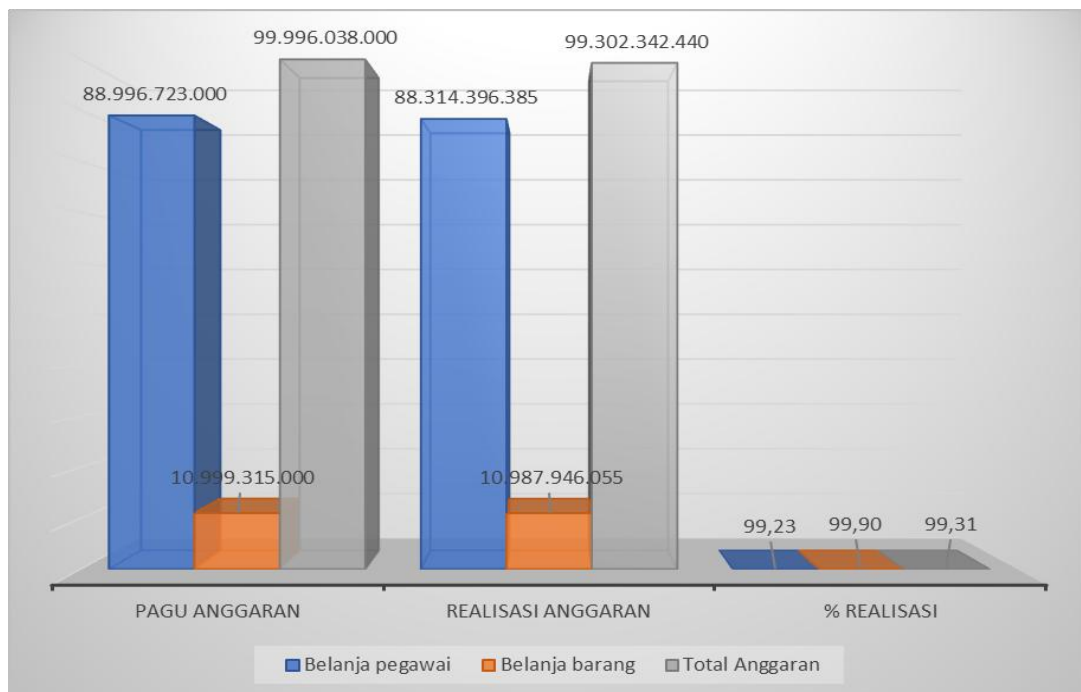
No.	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Output Awal	Pagu Anggaran Awal (Rp.000)	Output Revisi		Pagu Anggaran Revisi (Rp.000)	Realisasi Anggaran	
		T		T	R		Rp.000	%
I.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		4.077.606			4.033.400	4.033.368	100,00
	A. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		4.077.606			4.033.400	4.033.368	100,00
	1. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (KRO-Orang)	7	7.000	3	3	-	-	-
	- Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	7	7.000	3	3	-	-	-
	2. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (KRO-Kelompok masyarakat)	5.665	4.070.606	5.665	5.665	4.033.400	4.033.368	100,00
	- Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	5.665	4.070.606	5.665	5.665	4.033.400	4.033.368	100,00
II.	Program Dukungan Manajemen		82.029.965			95.962.638	95.268.974	99,28
	A. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		82.029.965			95.962.638	95.268.974	99,28
	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (KRO-4 Layanan)	4	81.974.965	4		95.962.038	95.268.374	99,28
	- Layanan BMN	1	10.000	1		600	600	100,00
	- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	15.000	1		450	450	100,00
	- Layanan Umum	1	20.000	1		17.480	17.261	98,75
	- Layanan Perkantoran	1	81.929.965	1		95.943.508	95.250.063	99,28
	2. Layanan Manajemen SDM Internal (KRO-1 Layanan)	1	10.000	-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Output Awal	Pagu Anggaran Awal (Rp.000)	Output Revisi		Pagu Anggaran Revisi (Rp.000)	Realisasi Anggaran	
		T		T	R		Rp.000	%
	- Layanan Manajemen SDM	1	10.000	-	-	-	-	-
	3. Layanan Manajemen Kinerja internal (KRO-4 Layanan)	4	45.000	1	1	600	600	100,00
	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	10.000	-	-	-	-	-
	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	15.000	-	-	-	-	-
	- Layanan Manajemen Keuangan	1	15.000	1	1	600	600	100,00
	- Layanan Kearsipan	1	5.000	-	-	-	-	-
Total Anggaran			86.107.571			99.996.038	99.302.342	99,31

Catatan:

- Pagu awal berdasarkan DIPA tanggal 2 Desember 2024 adalah Rp. 86.107.571,-
- Pagu berdasarkan DIPA revisi ke-11 tanggal 12 Desember 2025 adalah Rp. 99.996.038,-
- Data realisasi berdasarkan data OMSPAN per tanggal 31 Desember 2025

Realisasi anggaran Tahun 2025 berdasarkan pagu total (Rp.99.996.038.000) sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar Rp.99,31%. Realisasi anggaran per jenis belanja dari data OMSPAN per tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan pagu total dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3. Pagu dan Realisasi Anggaran BRPBATPP per Jenis Belanja Tahun 2025

2.2. Pelaksanaan Kegiatan Indikator Kinerja Utama BRPBATPP

Pada tahun 2025 BRPBATPP memiliki 8 indikator kinerja kegiatan yang masuk ke dalam indikator kinerja utama yang terkait dengan kegiatan penyuluhan. Kedelapan indikator kinerja kegiatan tersebut masuk ke dalam sasaran kegiatan “Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan

Perikanan”. Capaian kinerja 8 (delapan) indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama BRPBATPP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Tahun 2025		
				Target	Realisasi	%
1	Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP (kelompok)	4.800	5.665	118,02
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (kelompok)	248	250	100,81
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (kelompok)	889	911	102,47
		4	Gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBATPP (unit)	43	52	120,93 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
		5	Nilai PNBP satker BRPBATPP (rupiah milyar)	0,0928	0,1764	190,09 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
		6	Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BRPBATPP (paket)	1	1	100,00
		7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (orang)	3	5	166,67 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBATPP (orang)	14	18	128,57 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)

Sumber : Data diolah dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2025

Berikut adalah indikator kinerja utama BRPBATPP beserta kegiatan yang mendukungnya pada tahun 2025.

1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP (Kelompok)

Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga

berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usahanya.

Sasaran Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan adalah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan Perikanan. Kelompok yang didampingi oleh penyuluh dibagi menjadi 2, yaitu kelompok bidang usaha dan kelompok bidang pendukung usaha. Kelompok bidang usaha dibagi menjadi 5, yaitu : (1) Budidaya (Pokdakan / Kelompok Pembudi daya Ikan), (2) Penangkapan (KUB / Kelompok Usaha Bersama), (3) Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar / Kelompok Pengolah dan Pemasar), (4) Usaha Garam (Kugar / Kelompok Usaha Garam), dan (5) Pariwisata (Pokwisri / Kelompok Pengelola Wisata Bahari). Kelompok bidang pendukung usaha dibagi menjadi 2, yaitu : (1) Pengawasan (Pokmaswas / Kelompok Masyarakat Pengawas), dan (2) Konservasi (Kompak / Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi). Selain berdasarkan bidang usaha, kelompok yang didampingi juga berdasarkan kelas kelompoknya yang terdiri dari 4 kelas, yaitu : (1) Kelas Pemula, (2) Kelas Lanjut, (3) Kelas Madya, dan (4) Kelas Utama.

Wilayah pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan adalah kawasan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan. Pendampingan kelompok dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan anggota kelompok agar dapat berorganisasi dan dapat mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta keluarganya dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya penyuluh perikanan memiliki peran penting untuk terus mendampingi dan mengevaluasi kelembagaan kelompok agar visi, misi, tujuan, dan fungsi kelompok sebagai wadah pembelajaran dan kerjasama dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Kelompok pelaku usaha dan/atau pendukung yang disuluh merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh pada tahun berjalan oleh penyuluh kelautan dan perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan antara lain pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses perizinan berusaha, dan pendampingan manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Setiap kelompok memiliki kode registrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDMKP/Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang “Pedoman administrasi dan profil kelompok kelautan dan perikanan tahun 2025”.

Sebagai dasar penyusunan dokumen data dukung pendampingan kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan, Kapusluh KP menerbitkan surat No. B.714/BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 perihal "Kodifikasi Nomor Registrasi dan Profil ". Sedangkan sebagai dasar penilaian kelas kemampuan kelompok, Kapusluh KP menerbitkan beberapa surat sebagai berikut:

- (a) Surat No.B.838/BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025, tanggal 26 Maret 2025 perihal "Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok";
- (b) Surat No.B.1941/BPPSDM.2/RSDM.530/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal "Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan";
- (c) Surat No.B.2232/BPPSDM.2/RSDM.520/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal "Penyesuaian Kelas Kemampuan Kelompok".

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh koordinator penyuluh perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.

Pada tahun 2025 ini BRPBATPP memiliki target Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Pendukung yang mendapatkan penyuluhan sejumlah 5.665 kelompok. Selanjutnya target tersebut tertuang pada Perjanjian Kinerja awal di tahun 2025 antara BRPBATPP dengan Pusluh KP pada indikator kinerja utama Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP dengan target sejumlah 5.665 kelompok. Namun berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja per 11 Desember 2025, terdapat perubahan target indikator kinerja utama Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP menjadi 4.800 kelompok.

Sampai dengan akhir Desember 2025, jumlah kelompok yang telah disuluh dan disusun profilnya adalah sejumlah 5.665 kelompok atau sebesar 118,02% yang tersebar di 5 (lima) Provinsi yang merupakan wilayah kerja penyuluh perikanan BRPBATPP dengan berbagai bidang usaha. Berikut adalah keragaan Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP dari 5 (lima) propinsi dengan berbagai bidang usaha pada tahun 2025.

Tabel 2.4. Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025

No	Provinsi	Bidang Usaha							Total
		Penangkapan	Budidaya	Pengolahan/ Pemasaran	Wisata Bahari	Garam	Pengawasan	Konservasi	
1	Banten	61	152	56	-	-	-	-	269
2	DKI Jakarta	61	69	18	-	-	-	1	149

No	Provinsi	Bidang Usaha							Total
		Penangkapan	Budidaya	Pengolahan/ Pemasaran	Wisata Bahari	Garam	Pengawasan	Konservasi	
3	Jawa Barat	250	1.560	244	-	28	16	-	2.098
4	Jawa Tengah	606	1.832	373	-	47	32	-	2.890
5	DI Yogyakarta	17	209	25	-	1	7	-	259
Total		995	3.822	716	-	76	55	1	5.665

Sumber : Data Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Tahun 2025

Selain berdasarkan bidang usaha, keragaan kelompok yang disuluh juga dapat dilihat dari kelas kelompoknya. Berikut tabel yang menyajikan jumlah kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang disuluh berdasarkan kelas kelompok per provinsi.

Tabel 2.5. Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2025

No	Provinsi	Kelas Kelompok				
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Total
1	Banten	187	50	32	-	269
2	DKI Jakarta	79	56	14	-	149
3	Jawa Barat	1.380	395	322	1	2.098
4	Jawa Tengah	1.648	819	423	-	2.890
5	DI Yogyakarta	162	33	63	1	259
Total		3.456	1.353	854	2	5.665

Sumber : Data Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Tahun 2025

Dalam rangka mendukung kegiatan pengarusutamaan gender di lingkup BPPSDM KP, BRPBATPP melakukan pemilahan data terkait jenis kelamin ketua kelompok pada kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang disuluh pada tahun 2025 ini. Berikut tabel yang menyajikan gender ketua kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang disuluh per bidang usaha dan per kelas kelompok pada tahun 2025 di lingkup BRPBATPP.

Tabel 2.6. Gender Ketua Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025

No	Gender Ketua Kelompok	Bidang Usaha							Total	%
		Penangkapan	Budidaya	Pengolahan/ Pemasaran	Wisata Bahari	Garam	Pengawasan	Konservasi		
1	Laki-Laki	986	3.682	234	-	76	54	1	5.033	88,84
2	Perempuan	9	140	482	-	-	1	-	632	11,16
Total		995	3.822	716	-	76	55	1	5.665	100,00

Sumber : Data Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Tahun 2025

Tabel 2.7. Gender Ketua Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2025

No	Gender Ketua Kelompok	Kelas Kelompok				Total	%
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama		
1	Laki-Laki	3.079	1.192	760	2	5.033	88,84
2	Perempuan	377	161	94	-	632	11,16
Total		3.456	1.353	854	2	5.665	100,00

Sumber : Data Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Disuluh Tahun 2025

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kelompok pelaku usaha dan / atau pelaku pendukung yang disuluh oleh BRPBATPP dapat mencapai target pada tahun 2025 ini antara lain adalah:

- Penyuluh perikanan melakukan kegiatan pendampingan terhadap kelompok yang menjadi salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga setiap penyuluh harus mencapai targetnya sesuai dengan jenjangnya;
- Telah disusunnya manual IKI penyuluh kelautan dan perikanan oleh Pusluh KP yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh;
- Penyuluh telah menyusun / mengupdate profil kelompok sebagai data dukung untuk indikator kinerja kelompok pelaku usaha dan / atau pelaku pendukung yang disuluh oleh BRPBATPP.

Meskipun indikator kinerja ini telah tercapai targetnya, namun terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk capaian indikator kinerja ini kedepannya. Masih terdapat permasalahan terkait penyusunan profil kelompok oleh penyuluh perikanan, yaitu format atau outline profil kelompok yang disampaikan oleh penyuluh perikanan masih ada yang belum sesuai dengan surat Kepala Pusat Penyuluhan KP No. B.714/ BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 perihal "Kodifikasi Nomor Registrasi dan Profil".

Terkait dengan permasalahan penyusunan profil kelompok tersebut, maka tim kerja penyuluhan perikanan BRPBATPP dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyampaian kembali format atau outline profil kelompok pada tahun 2026 kepada penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP melalui surat atau melalui kegiatan pendampingan oleh tim kerja penyuluhan perikanan baik secara luring maupun daring.

2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)

Peningkatan kelas kelompok merupakan indikasi bahwa kelompok telah mampu

memfasilitasi anggotanya dalam meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraannya. Kelas kemampuan kelompok adalah indikator bukan tujuan, untuk itu strategi peningkatan kelas kelompok haruslah strategi yang mampu mengantarkan pelaku utama perikanan memiliki keberdayaan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Peningkatan kelas kelompok merupakan alat untuk mengukur keberhasilan penyuluh dalam melakukan pemberdayaan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dalam kelompoknya. Indikatornya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama. Oleh sebab itu peningkatan kelas kelompok haruslah sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama/usaha.

Kelompok kelautan dan perikanan yang dianggap naik kelasnya harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu : (1) jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Perikanan; dan/atau (2) jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas dan dalam proses penetapan.

Kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung kelautan dan perikanan setelah mendapatkan pendampingan penyuluh kelautan dan perikanan, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan kriteria sesuai Permen KP No. 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Pengukuhan kelas kelompok setelah dilakukan penilaian dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, camat, atau Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Perikanan, maka kelas kemampuan kelompok diklasifikasikan menjadi:

1. Kelas Pemula, untuk kelompok yang memperoleh nilai ≤ 250 ;
2. Kelas Lanjut, untuk kelompok yang memperoleh nilai $> 250-500$;
3. Kelas Madya, untuk kelompok yang memperoleh nilai $> 500-750$;
4. Kelas Utama, untuk kelompok yang memperoleh nilai $> 750-1.000$.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kelompok yang telah memperoleh kelas kemampuan kelompok berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.14/MEN/2012 tentang “Pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan” disesuaikan sebagai berikut:

- Kelas pemula dengan perolehan nilai ≤ 250 , tetap sebagai kelas pemula.
- Kelas pemula dengan perolehan nilai >250 sampai dengan 350, disesuaikan sebagai kelas lanjut.
- Kelas madya dengan perolehan nilai >350 sampai dengan 650, tetap sebagai kelas madya.
- Kelas utama dengan perolehan nilai >650 sampai dengan 1000, tetap sebagai kelas utama.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP No.28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Sebagai dasar pelaksanaan penilaian kelas kemampuan kelompok, selanjutnya Kapuslulh KP menerbitkan:

- (1) Surat No.B.838/BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025, tanggal 26 Maret 2025 perihal "Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok"
- (2) Surat No.B.1941/BPPSDM.2/RSDM.530/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal "Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan" dan
- (3) Surat No.B.2232/BPPSDM.2/RSDM.520/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal "Penyesuaian Kelas Kemampuan Kelompok".

Sampai dengan akhir Desember 2025, jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya dari target 248 kelompok telah tercapai sejumlah 250 kelompok atau sebesar 100,81% yang tersebar di 5 (lima) provinsi yang merupakan wilayah kerja penyuluh perikanan BRPBATPP dengan berbagai bidang usaha, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8. Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025

No	Provinsi	Bidang Usaha							Total
		Penangkapan	Budidaya	Pengolahan/ Pemasaran	Wisata Bahari	Garam	Pengawasan	Konservasi	
1	Banten	3	3	2	-	-	-	-	8
2	DKI Jakarta	3	6	3	-	-	-	-	12
3	Jawa Barat	6	75	10	-	-	-	-	91

No	Provinsi	Bidang Usaha							Total
		Penangkapan	Budidaya	Pengolahan/ Pemasaran	Wisata Bahari	Garam	Pengawasan	Konservasi	
4	Jawa Tengah	26	79	17	-	3	-	-	125
5	DI Yogyakarta	-	13	1	-	-	-	-	14
Total		38	176	33	0	3	0	0	250

Sumber : Data Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Tahun 2025

Selain berdasarkan bidang usaha, keragaan kelompok yang ditingkatkan kelasnya juga dapat dilihat dari kelas kelompoknya. Berikut tabel yang menyajikan jumlah kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya berdasarkan kelas kelompok per provinsi.

Tabel 2.9. Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2025

No	Provinsi	Kelas Kelompok			Total
		Pemula ke Lanjut	Lanjut ke Madya	Madya ke Utama	
1	Banten	3	5	-	8
2	DKI Jakarta	4	8	-	12
3	Jawa Barat	36	54	1	91
4	Jawa Tengah	37	87	1	125
5	DI Yogyakarta	3	11	-	14
Total		83	165	2	250

Sumber : Data Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Tahun 2025

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kelompok pelaku usaha dan / atau pelaku pendukung yang ditingkatkan kelasnya oleh BRPBATPP pada tahun 2025 dapat melampaui target antara lain adalah:

1. Penyuluh telah melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok antara lain melakukan penyuluhan serta melakukan penilaian kelas terhadap kelompok binaannya yang merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh sehingga setiap penyuluh harus mencapai targetnya sesuai dengan jenjang jabatannya;
2. Kelompok yang telah dilakukan penilaian telah memenuhi kriteria untuk dapat dinaikkan kelasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No.28 Tahun 2024 Tentang “Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan” serta sesuai dengan surat Kepala Pusat Penyuluhan KP berikut ini:
 - (1) Surat No.B.838/BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025, tanggal 26 Maret 2025 perihal "Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok"

- (2) Surat No.B.1941/BPPSDM.2/RSDM.530/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal "Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan" dan
- (3) Surat No.B.2232/BPPSDM.2/RSDM.520/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal "Penyesuaian Kelas Kemampuan Kelompok".

Dalam rangka mendukung kegiatan pengarusutamaan gender di lingkup BPPSDM KP, BRPBATPP melakukan pemilahan data terkait jenis kelamin ketua kelompok pada kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya pada tahun 2025 ini. Berikut tabel yang menyajikan gender ketua kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya per bidang usaha dan per kelas kelompok pada tahun 2025 di lingkup BRPBATPP.

Tabel 2.107. Gender Ketua Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025

No	Gender Ketua Kelompok	Bidang Usaha							Total	%
		Penangkapan	Budidaya	Pengolahan/ Pemasaran	Wisata Bahari	Garam	Pengawasan	Konservasi		
1	Laki-Laki	37	171	10	-	3	-	-	221	88,40
2	Perempuan	1	5	23	-	-	-	-	29	11,60
Total		38	176	33	-	3	-	-	250	100,00

Sumber : Data Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Tahun 2025

Tabel 8.11. Gender Ketua Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Berdasarkan Kelas Kelompok Tahun 2025

No	Gender Ketua Kelompok	Kenaikan Kelas Kelompok			Total	%
		Pemula Ke Lanjut	Lanjut Ke Madya	Madya Ke Utama		
1	Laki-Laki	68	151	2	221	88,40
2	Perempuan	15	14	-	29	11,60
Total		83	165	2	250	100,00

Sumber : Data Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Ditingkatkan Kelasnya Tahun 2025

3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)

Kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang dibentuk merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dibentuk pada tahun berjalan, dengan kriteria pembentukan kelompok berdasarkan Permen KP No. 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor

kelautan dan perikanan.

Penumbuhan Kelompok pelaku utama sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tugas Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pendampingan. Tujuan dari kegiatan penumbuhan kelompok adalah sebagai berikut :

- Sebagai indikator kinerja bagi Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pendampingan kelompok perikanan; dan
- Sebagai acuan dalam rangka pembinaan kelembagaan pelaku utama perikanan.

Dalam melakukan kegiatan penumbuhan kelompok, penyuluh perikanan melakukan identifikasi pelaku utama yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.
- Memiliki usaha sektor kelautan dan perikanan.
- Memiliki kesamaan dalam tradisi kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, atau bahasa.
- Mandiri dan partisipatif
- Merupakan binaan dari penyuluh perikanan

Pada tahun 2025 ini BRPBATPP memiliki target kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang dibentuk sejumlah 911 kelompok yang tertuang pada Perjanjian Kinerja awal di tahun 2025 antara BRPBATPP dengan Pusluh KP. Namun berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja per 11 Desember 2025, terdapat perubahan target indikator kinerja utama kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang dibentuk oleh BRPBATPP menjadi 889 kelompok.

Sampai dengan akhir Desember 2025, kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang dibentuk adalah sejumlah 911 kelompok atau sebesar 102,47% yang tersebar di 5 (lima) Provinsi yang merupakan wilayah kerja penyuluh perikanan BRPBATPP dengan berbagai bidang usaha. Berikut adalah keragaan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang dibentuk oleh BRPBATPP dari 5 (lima) propinsi dengan berbagai bidang usaha pada tahun 2025.

Tabel 2.12. Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Dibentuk Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025

No	Provinsi	Bidang Usaha							Total
		Penangkapan	Budidaya	Pengolahan/ Pemasaran	Wisata Bahari	Garam	Pengawasan	Konservasi	
1	Banten	18	152	20	-	-	-	-	72
2	DKI Jakarta	13	34	3	-	-	-	2	24
3	Jawa Barat	43	6	50	2	7	6	1	384
4	Jawa Tengah	68	275	44	3	13	6	1	381

No	Provinsi	Bidang Usaha							Total
		Penangkapan	Budidaya	Pengolahan/ Pemasaran	Wisata Bahari	Garam	Pengawasan	Konservasi	
5	DI Yogyakarta	3	246	7	-	-	-	-	50
Total		145	601	124	5	20	12	4	911

Sumber : Data Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Dibentuk Tahun 2025

Dalam rangka mendukung kegiatan pengarusutamaan gender di lingkup BPPSDM KP, BRPBATPP melakukan pemilahan data terkait jenis kelamin anggota kelompok pada kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang dibentuk pada tahun 2025 ini. Berikut tabel yang menyajikan gender anggota kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang disuluh per bidang usaha pada tahun 2025 di lingkup BRPBATPP.

Tabel 2.13. Gender Anggota Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Dibentuk Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2025

No	Gender Anggota Kelompok	Bidang Usaha							Total	%
		Penangkapan	Budidaya	Pengolahan/ Pemasaran	Wisata Bahari	Garam	Pengawasan	Konservasi		
1	Laki-Laki	1.948	6.303	316	82	253	171	45	9.118	81,38
2	Perempuan	14	918	1.118	4	23	6	3	2.086	18,62
Total		1.962	7.221	1.434	86	276	177	48	11.204	100,00

Sumber : Data Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha yang Dibentuk Tahun 2025

Faktor pendukung yang menyebabkan target Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk Tahun 2025 ini dapat melampaui target antara lain adalah:

- Pembentukan kelompok merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh Perikanan sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya.
- Banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru sehingga penyuluh dapat mencapai targetnya.

4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBATPP (Unit)

Gabungan kelompok dan/atau koperasi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah gabungan kelompok dan/atau koperasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP No. 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan penyuluh kelautan dan perikanan. Pada

tahun 2025, target gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan adalah 43 unit. Sampai dengan akhir tahun 2025, gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan telah tercapai sejumlah 52 unit atau sebesar 120,93%. Jumlah gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan Tahun 2025

No	Provinsi	Klasifikasi Kelembagaan		Total
		Gapokkan	Koperasi	
1	Banten	-	2	2
2	DKI Jakarta	1	-	1
3	Jawa Barat	4	19	23
4	Jawa Tengah	8	16	24
5	DI Yogyakarta	1	1	2
Jumlah		14	38	52

Sumber : Data Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan Tahun 2025

Dalam rangka mendukung kegiatan pengarusutamaan gender di lingkup BPPSDM KP, BRPBATPP melakukan pemilahan data terkait jenis kelamin ketua kelompok pada Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan pada tahun 2025 ini. Berikut tabel yang menyajikan gender ketua kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang disuluh per bidang usaha dan per kelas kelompok pada tahun 2025 di lingkup BRPBATPP.

Tabel 2.15. Gender Ketua Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Tahun 2025

No	Gender Ketua Gapokkan / Koperasi	Klasifikasi Kelembagaan		Total	%
		Gapokkan	Koperasi		
1	Laki-Laki	13	34	47	90,38
2	Perempuan	1	4	5	9,62
Total		14	38	52	100,00

Sumber : Data Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan Tahun 2025

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBATPP pada tahun 2025 dapat melampaui target antara lain adalah:

1. Penyuluh telah melakukan kegiatan pendampingan kepada gapokkan dan/atau koperasi yang telah terbentuk sebelumnya yang merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) penyuluh sehingga setiap penyuluh harus mencapai targetnya sesuai dengan jenjang jabatannya.

2. Penyuluh melakukan kegiatan pendampingan dalam bentuk fasilitasi pembentukan koperasi baru pada tahun 2025.
3. Profil gapokkan / koperasi telah disusun / diupdate oleh penyuluh perikanan sesuai format berdasarkan surat :
 - (1) Surat Kapusluh KP No.B.714/BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 perihal "Kodifikasi Nomor Registrasi dan Profil"
 - (2) Surat Kapusluh KP No. B.759/BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal "Kodifikasi dan Profil Gabungan Kelompok Sektor KP".
 - (3) Surat Kapusluh KP No. B.1941/BPPSDM.2/RSDM.530/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal "Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan"

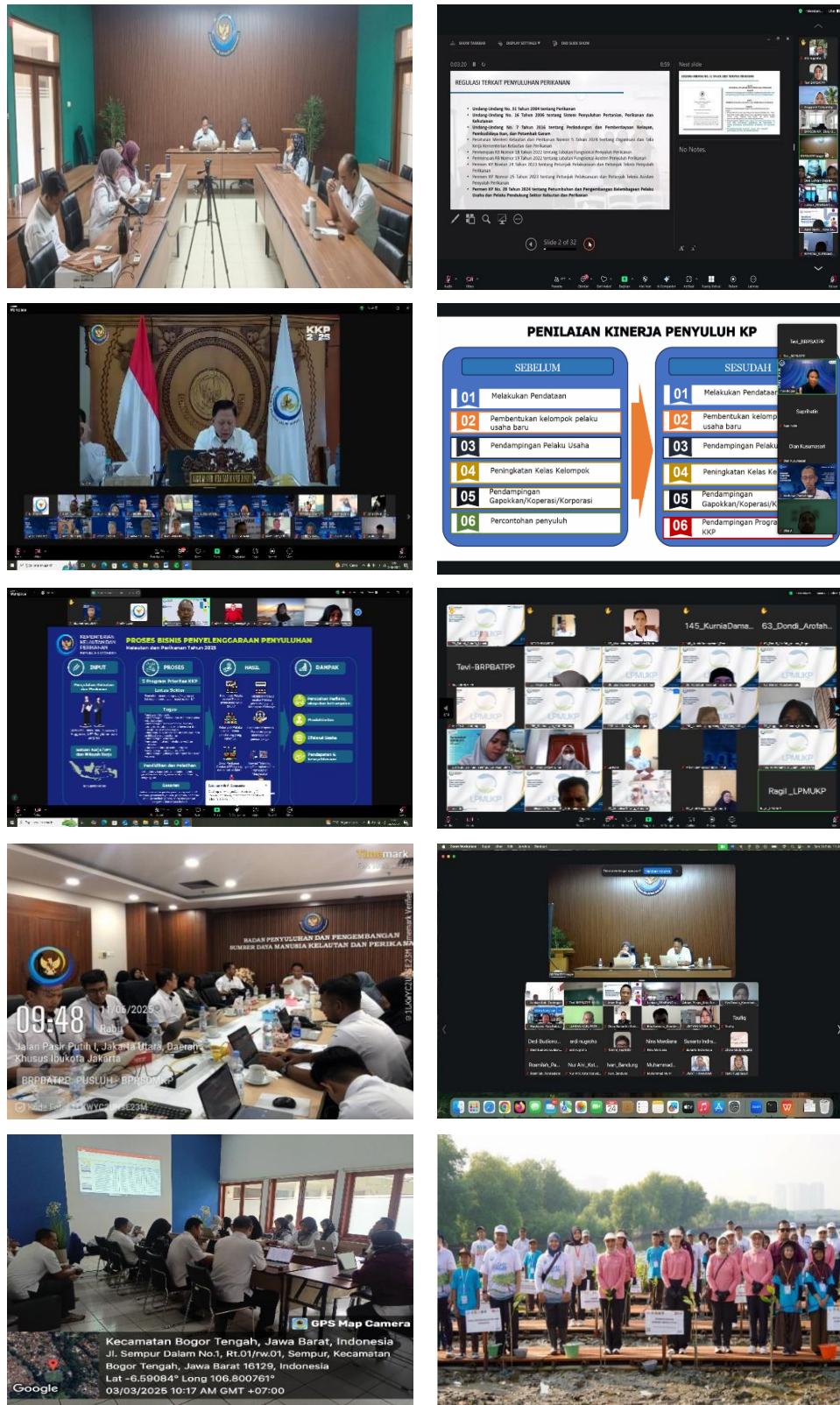
Dalam rangka mendukung tercapainya keempat indikator kinerja diatas, BRPBATPP melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang merupakan pembaharuan dari Keputusan menteri kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada tanggal 21 Januari 2025. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Penyuluhan KP dan dihadiri oleh penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP. Hadir sebagai narasumber adalah Ketua Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan, Pusluh KP;
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi mekanisme kerja Penyuluh Perikanan yang dilaksanakan secara daring via zoom meeting pada tanggal 17 Februari 2025. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dan dihadiri oleh Kepala BRPBATPP, tim kerja penyuluhan perikanan BRPBATPP, dan penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP;
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP dalam rangka percepatan capaian kinerja IKU penyuluhan tahun 2025;
4. Melaksanakan monitoring kepada penyuluh kelautan dan perikanan terkait profil dan administrasi kelompok ke beberapa kabupaten / kota wilayah kerja BRPBATPP yang meliputi provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah baik secara daring melalui aplikasi zoom meeting maupun secara luring, antara lain Kabupaten Kuningan, Purwakarta, Provinsi Banten yang berlokasi di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dan sebagainya;

5. Melaksanakan kegiatan Fish Market Day yang bekerjasama dengan stakeholder terkait (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Koperasi Perikanan, dan sebagainya) di kantor BRPBATPP Jalan Sempur No.1, Bogor Tengah dalam rangka menciptakan akses pasar bagi pelaku usaha perikanan yang merupakan binaan Penyuluh Perikanan Kota Bogor dan/atau Kabupaten Bogor;
6. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kerja Baru dan Efisiensi Anggaran lingkup BRPBATPP yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada tanggal 3 Maret 2025. Kegiatan dibuka oleh Kepala BRPBATPP dan dihadiri oleh Kasubbag Umum BRPBATPP, tim kerja penyuluhan perikanan, dan penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP;
7. Melaksanakan kegiatan koordinasi pembahasan manual IKI dan data dukung kegiatan penyuluh lingkup Kabupaten Bogor dilaksanakan di Aula Instalasi Cibalagung, Kota Bogor pada tanggal 10 April 2025. Pertemuan dihadiri oleh seluruh Penyuluh Kabupaten Bogor dengan narasumber dari Timja Penyuluhan BRPBATPP;
8. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Koperasi Merah Putih yang dilaksanakan oleh Deputi Literasi dan Penyuluhan, Kementerian Koperasi secara daring via zoom meeting pada tanggal 23 April 2025. Tujuan pertemuan adalah untuk mendorong terbentuknya 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Pertemuan di hadiri oleh Asisten Deputi Literasi dan Penyuluhan, Kepala Pusat Penyuluhan Perikanan dan Penyuluh Perikanan Lingkup Pusluh KP. Pertemuan dilanjutkan pada tanggal 24 April 2025, dengan dilakukannya Sosialisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tindak Lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih yang dilaksanakan secara daring via zoom meeting. Pertemuan Sosialisasi dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan diikuti oleh semua Penyuluh Perikanan di Indonesia;
9. Melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) dalam rangka Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)”;
10. Melaksanakan sosialisasi aplikasi SIMPEL-KP dilaksanakan secara daring dengan narasumber Ketua Tim Kerja Penyuluhan BRPBATPP pada tanggal 6 Mei 2025. Pertemuan dihadiri oleh peserta zoom berjumlah 387 orang yang merupakan penyuluh KP dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah;
11. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) kepada pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan BRPBATPP;
12. Melaksanakan kegiatan verifikasi capaian kinerja yang telah diinput penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP pada aplikasi SIMPEL-KP;

13. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengisian Data Dukung SKP Penyuluh;
14. Mengikuti kegiatan pertemuan pembahasan Penyamaan persepsi Format Daduk capaian IKU dan persepsi implementasi Permen KP No.28 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan KP secara daring via zoom meeting pada tanggal 21 Juli 2025. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka menyamakan format data dukung untuk capaian IKU penyuluh pada semua UPT Penyuluhan lingkup Pusat Penyuluhan KP. Penyamaan persepsi ini perlu dilakukan karena adanya peralihan Peraturan tentang penumbuhan dan pengembangan kelompok dari Kepmen KP 14 Tahun 2012 ke Permen KP No.28 tahun 2024;
15. Mengikuti pertemuan pembahasan rancangan Keputusan Kepala BPPSDM KP tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP pada tanggal 14 Agustus 2025;
16. Mengikuti kegiatan sosialisasi program prioritas KKP yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Teknis KKP;
17. BRPBATPP yang diwakili oleh Penyuluh Perikanan Jakarta Utara berpartisipasi aktif dalam kegiatan Groundbreaking Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Kick-Off Program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) yang diselenggarakan pada Rabu, 6Agustus 2025, bertempat di Gelanggang Olah Raga KamalMuara, Jakarta Utara. Acara ini dihadiri lebih dari 700 peserta dari lintas instansi, komunitas, akademisi, siswa, serta masyarakat pesisir Kamal Muara. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung rehabilitasi pesisir dan pengelolaan sampah laut secara berkelanjutan. Program Laut Sebasah adalah Langkah konkret untuk mengelola sampah laut dari hulu ke hilir secara terpadu;
18. Mengikuti kegiatan pembahasan penyusunan dan pembahasan rancangan Keputusan Kepala BPPSDM tentang rekomendasi teknologi KP sebagai materi penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan KP pada tanggal 10 September 2025 secara daring melalui aplikasi zoom meeting;
19. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi Kelembagaan Calon Penerima Bantuan KNMP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, DJPT. Pertemuan dilaksanakan secara daring via zoom meeting dan diikuti oleh Penyuluh Perikanan pendamping Koperasi Nelayan Merah Putih pada tanggal 11 September 2025;
20. Melaksanakan rapat percepatan realisasi kinerja penyuluh perikanan dalam rangka persiapan pengukuran kinerja penyuluh perikanan triwulan III tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring dan luring. Kegiatan dibuka oleh Kepala BRPBATPP dan dihadiri oleh tim kerja penyuluhan perikanan BRPBATPP serta Korluh dan penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPBATPP dalam rangka mendukung indikator kinerja penyuluhan.



Gambar 2.4. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Tahun 2025

5. Nilai PNBP Satker BRPBATPP (Rupiah Milyar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2025, BRPBATPP memiliki target PNBP pada dokumen DIPA BRPBATPP Tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,0928 Milyar (Rp.92.800.000). Selama tahun 2025 BRPBATPP telah menghasilkan PNBP sejumlah Rp.0,1764 Milyar atau Rp.176.484.476 (190,09%). Berikut rekap penerimaan PNBP per bulan di tahun 2025.

Tabel 2.16. Rekap Penerimaan PNBP BRPBATPP Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Penerimaan PNBP (Rp.)	Akumulasi s/d Bulan
1	Januari	6.975.835	6.975.835
2	Februari	5.688.000	12.663.835
3	Maret	4.656.621	17.320.456
4	April	21.200.000	38.520.456
5	Mei	4.512.500	43.032.956
6	Juni	11.057.500	54.090.456
7	Juli	12.662.900	66.753.356
8	Agustus	6.314.900	73.068.256
9	September	11.250.900	84.319.156
10	Oktober	7.386.000	91.705.156
11	November	6.945.000	98.650.156
12	Desember	77.834.320	176.484.476
Total		176.484.476	176.484.476

Sumber : Data OMSPAN Tahun 2025

Nilai PNBP BRPBATPP pada tahun 2025 berasal dari penerimaan beberapa akun sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.17. Penerimaan PNBPN BRPBATPP per Akun Tahun 2025

No.	Kode Akun	Nama Akun	Target PNBPN pada DIPABRPBATPP (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	54.724.000	57.944.000	105,88
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	35.000.000	89.879.320	256,80
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	1.608.000	100,00
4	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.800.000	9.000.000	500,00
5	425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	276.000	-	-
6	425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	-	513.371	100,00
7	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	17.539.785	100,00
8	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.000.000	-	-
Total			92.800.000	176.484.476	190,09

Sumber: Data berdasarkan Realisasi PNBPN pada aplikasi OMSPAN per 02 Januari 2026

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja nilai PNBPN satker BRPBATPP melampaui target adalah karena tercapainya setoran PNBPN berdasarkan data realisasi pendapatan per akun sampai dengan bulan Desember 2025 pada aplikasi OM SPAN yang berasal dari pendapatan berikut ini:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berupa penjualan ikan dari Instalasi Cijeruk dan Cibalong;
2. Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya berupa setoran penjualan vaksin dari PT.Caprifarmindo Laboratories;
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi berupa penyewaan guest house di Instalasi Cijeruk;
4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa sewa aula di instalasi Cijeruk;
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu;
6. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa penjualan mesin pakan dari instalasi Cijeruk serta penjualan kendaraan dinas.

6. Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di BRPBATPP (Paket)

Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh penyuluh perikanan kepada pelaku usaha sektor KP sesuai binaannya. Bukti capaian untuk indikator kinerja ini adalah media penyuluhan dalam bentuk softcopy/file yang telah disusun oleh Satminkal sesuai kebutuhan pelaku usaha untuk digunakan penyuluh perikanan melakukan penyuluhan. Pada tahun 2025 ini, BRPBATPP memiliki target 1 paket Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha. Sampai dengan akhir Desember 2025 jumlah media penyuluhan yang ditargetkan 1 paket telah tercapai 1 paket dimana didalamnya terdapat 6 materi, sehingga realisasi capaiannya adalah 100,00%.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BRPBATPP pada tahun 2025 dapat melampaui target antara lain adalah telah tersusunnya 1 paket media cetak terdiri dari 6 materi, yaitu:

- (1) Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Kapal Perikanan
- (2) Perawatan Alat Tangkap Ikan
- (3) Merawat Kapal Penangkap Ikan
- (4) Sertifikasi SKP
- (5) Proses Pembuatan Pakan Buatan
- (6) Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan

7. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)

Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, perlu pendampingan intensif dari Penyuluh Perikanan yang

kompeten, sehingga para penyuluh perikanan harus mempunyai standar kompetensi yaitu pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyuluh Perikanan. Untuk menjadi penyuluh perikanan yang kompeten perlu dilakukan uji kompetensi sehingga pendampingan kepada pelaku utama/usaha dapat lebih intensif dan memberikan dampak yang positif.

Uji Kompetensi Penyuluh Perikanan adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Uji kompetensi ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan penyuluh perikanan dalam menjalankan tugasnya.

Jumlah penyuluh perikanan yang lulus penilaian kompetensi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti dan lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh *Assesment Center* KKP. Bukti capaian untuk indikator kinerja ini adalah: (1) Data penyuluh perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi by name by address beserta link sertifikat/surat keterangan dari Biro SDMAO KKP, dan (2) Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

Pada tahun 2025 ini, BRPBATPP memiliki target 3 orang penyuluh perikanan yang lulus penilaian kompetensi. Sampai dengan akhir Desember 2025, dari target 3 orang telah tercapai 5 orang yang lulus penilaian kompetensi atau sebesar 166,67%.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja jumlah penyuluh perikanan yang lulus penilaian kompetensi di BRPBATPP pada tahun 2025 dapat melampaui target adalah:

- (1) Dukungan dari pimpinan berupa usulan penyuluh yang akan mengikuti penilaian kompetensi berupa surat Usulan Uji Kompetensi Penyuluh Perikanan Periode 2025 dari Kepala BRPBATPP yang ditujukan kepada Sekretaris BPPSDMKP dengan nomor B.33/BRPBATPP/KP.320/I/2025 tertanggal 10 Januari 2025;
- (2) Kompetensi dasar sudah dimiliki Penyuluh perikanan yang mengikuti penilaian kompetensi; dan
- (3) Efektifnya pelatihan penulisan karya ilmiah yang diadakan oleh Balai dalam rangka penilaian kompetensi penyuluh perikanan jenjang madya.

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Penyusunan usulan Penyuluh Perikanan yang mengikuti penilaian kompetensi;
2. Pemantauan hasil penilaian kompetensi Penyuluh Perikanan.

8. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBATPP (Orang)

Tujuan program pelatihan teknis adalah meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan, dengan sasaran meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan terampil, dan tenaga penyuluh perikanan pada sentra perikanan.

Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan yang lulus pelatihan teknis merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 (dua) tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan yang dihitung merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan menghitung penyuluh yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis serta mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang berwenang.

Sampai dengan Bulan Desember 2025, jumlah penyuluh kelautan dan perikanan yang lulus pelatihan teknis sebanyak 18 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 14 orang atau sebesar 128,57%.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja jumlah penyuluh kelautan dan perikanan yang lulus pelatihan teknis di BRPBATPP dapat melampaui target adalah telah lulusnya penyuluh perikanan yang mengikuti kegiatan pelatihan teknis yang diikuti oleh penyuluh perikanan yang sesuai dengan ketentuan dengan output berupa sertifikat pelatihan yang terdapat satuan waktu untuk mengukur beban pembelajaran dalam pelatihan atau diklat yaitu JP (Jam Pelajaran).

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah pemantauan hasil sertifikasi kompetensi Penyuluh Perikanan.

2.3. Pelaksanaan Kegiatan Indikator Kinerja Manajerial BRPBATPP

Pada tahun 2025 BRPBATPP memiliki 9 indikator kinerja kegiatan yang masuk ke dalam indikator kinerja manajerial. Kesembilan indikator kinerja kegiatan tersebut masuk ke dalam sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”. Capaian kinerja 9 (sembilan) indikator kinerja manajerial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Manajerial BRPBATPP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Tahun 2025		
				Target	Realisasi	%
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPBATPP (dokumen)	1	2	200,00 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)	85	100	117,65
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP (nilai)	92	98,09	106,62
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP (nilai)	81	82,90	102,35
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP (nilai)	71,5	100,00	139,86 atau 120,00 (pada aplikasi kinerjaku)
		14	Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (indeks)	81	84,99	104,93
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBATPP (%)	80	100	125,00 atau 120,00 pada aplikasi kinerjaku
		16	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di BRPBATPP (%)	80	97,5	121,87 atau 120,00 pada aplikasi kinerjaku
		17	Persentase layanan dukungan manajemen internal BRPBATPP (%)	100	100	100

Sumber : Data diolah dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2025

Berikut adalah indikator kinerja manajerial BRPBATPP beserta kegiatan yang mendukungnya pada tahun 2025.

1. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPBATPP (Dokumen)

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara satuan kerja BRPBATPP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip Bersama. Bentuk kemitraan diantaranya dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan Perikanan serta pemanfaatan BMN lingkup BRPBATPP.

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti merupakan jumlah dokumen kerja sama nasional dan/atau internasional antara BRPBATPP dengan pihak mitra kerja sama yang ditandatangani/disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang “Pedoman kerja sama dan penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Selama tahun 2025 kegiatan kemitraan yang ditindaklanjuti dibidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang sesuai dengan Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 yaitu : (1) Kemitraan dengan Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar, dan (2) Kemitraan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Indramayu.

Selain (2) dua kemitraan diatas, terdapat kemitraan lain yang masih berjalan namun tidak menjadi capaian untuk indikator kinerja kemitraan, yaitu kegiatan kemitraan dengan PT.BRI yang terkait sewa lahan untuk pengoperasian ATM. Kegiatan lain yang dilaksanakan di tahun 2025 terkait kemitraan adalah kegiatan inisiasi dengan FAO.

Pada tahun 2025 ini target dari kemitraan adalah 1 dokumen. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi kemitraan Adalah 2 dokumen atau sebesar 200,00%. Berikut adalah rekap kemitraan serta inisiasi kemitraan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19. Kemitraan dan Inisiasi Kemitraan yang Dilaksanakan BRPBATPP Tahun 2025

No.	Mitra Kerjasama	Status Kemitraan	Tujuan Kemitraan/Inisiasi Kemitraan	Keterangan
I.	Kemitraan			
1.	Program Studi Akuakultur, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar	On-Going	Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan (dosen praktisi mengajar,	- Perjanjian Kerja Sama : Nomor B/105/UN57.F4/KS.05.00/2024 dan Nomor: 2/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024 (Ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2024) - Jangka waktu 2 (dua) tahun

No.	Mitra Kerjasama	Status Kemitraan	Tujuan Kemitraan/Inisiasi Kemitraan	Keterangan
			PKL, magang, MBKM, kuliah umum, publikasi KTI dan kunjungan lapang); pengabdian kepada masyarakat dan pertukaran informasi dan teknologi terkait perikanan budidaya	sejak penandatanganan Kerja sama.
2.	SMK Negeri 2 Indramayu	On-Going	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan (PKL, kunjungan industri dan magang untuk tenaga pendidik)	- Perjanjian Kerja Sama : Nomor 35/BPPSDM/KKP/PKS/VIII/2024 dan Nomor 837/PK.01.02/SMKN2-Cadisik Wil.IX (Ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2024) - Jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penandatanganan Kerja sama.
3.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pajajaran Bogor	On-Going	Sewa lahan untuk pengoperasian mesin ATM BRI	- Perjanjian Kerja Sama: Nomor 01/BRSDM.BRPBATPP/PKS/XI I/2023 (BRPBATPP) dan Nomor: B.138a/KC.XIV /LOG/XII/2023 (Ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2023) - Jangka waktu 3 tahun (22 Desember 2023 s/d 21 Desember 2026)
II. Inisiasi Kemitraan				
1.	Hibah FAO	Inisiasi	Memperkuat pembangunan desa perikanan cerdas yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta mendukung peningkatan kapasitas masyarakat pesisir	Pembahasan awal inisiasi kerja sama pada tanggal 30 Juni 2025.

Sumber : Data Kemitraan Tahun 2025

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti di BRPBATPP dapat mencapai target pada tahun 2025 ini antara lain adalah:

1. Telah ditindaklanjutinya kemitraan pada tahun 2025 yang meliputi:

(1) Kemitraan dengan Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar

- a. Penerimaan mahasiswa Untidar sebanyak 6 orang untuk melaksanakan MBKM di BRPBATPP selama 4 bulan pada bulan Februari-Juni 2025
 - b. Pelaksanaan seminar hasil MBKM sebagai sarana evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan.
- (2) Kemitraan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Indramayu (SMKN 2 Indramayu)
- a. Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) sebanyak 9 orang selama 5 bulan dari bulan Agustus - Desember 2025 yang dibagi menjadi 3 kelompok
 - b. Seminar hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) Siswa SMKN 2 Indramayu dan evaluasi kegiatan implementasi kerjasama antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu.
2. Telah disusunnya laporan pelaksanaan kegiatan kemitraan pada tahun 2025

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah penyusunan laporan kegiatan kemitraan dan/atau kerja sama. Selain itu terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini, yaitu : (1) Memasukkan target penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kemitraan tahun 2025 pada SKP pegawai; (2) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui: (a) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP, dan (b) kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per triwulan di internal BRPBATPP.

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BRPBATPP sampai dengan waktu pengukuran.

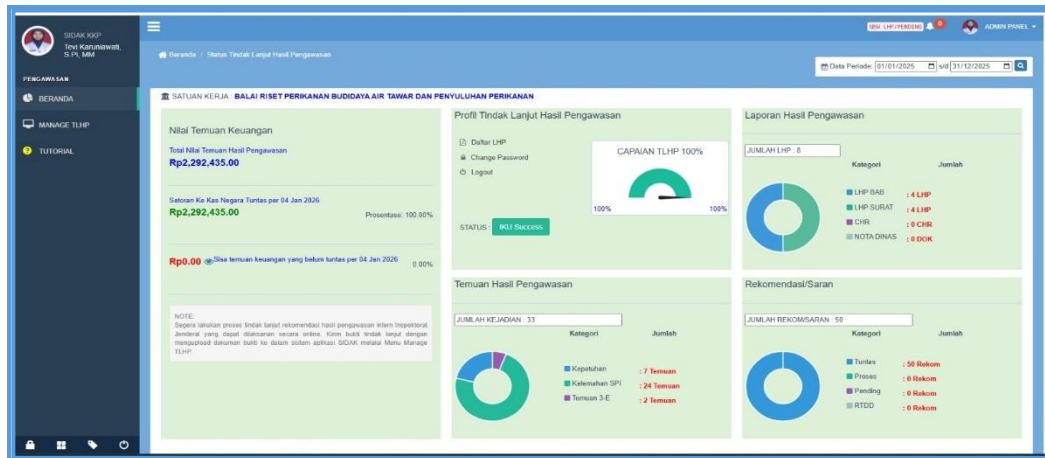
Pengukuran indikator kinerja ini merupakan jumlah rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BRPBATPP dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BRPBATPP dikali 100%.

Periode pelaporan untuk indikator kinerja ini adalah triwulanan. Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah berupa surat penyampaian hasil rekomendasi pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP. Target indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah 85%. Sampai dengan akhir Desember 2025, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP adalah sebesar 100,00% atau persentase capaiannya sebesar 117,65%.

Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi SIDAK selama tahun 2025 dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada Triwulan IV Tahun 2024 Itjen KKP melakukan pemantauan terhadap Satker BRPBATPP dan mengeluarkan surat LHP No. T.1128/ITJ.3/HP.380/XII/2024
2. Terdapat 3 buah temuan dengan obyek pengawasan adalah Hasil Reviu Perjanjian Pemanfaatan/Sewa BMN Pada BRPBATPP Bogor
3. Dari temuan awal berjumlah 3 buah di Triwulan IV Tahun 2024, telah dilakukan tindak lanjut oleh Satker BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2025
4. Berdasarkan Surat Inspektur V Itjen KKP No. B.713/ITJ.5/PL.450/IX/2025 tanggal 26 September 2025 perihal Penyampaian Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Inspektorat V terkait Laporan Pengelolaan Kas Bendahara pada BRPBATPP Bogor, terdapat 2 temuan dan 3 rekomendasi. Temuan ini telah ditindaklanjuti namun tidak diinput pada aplikasi SIDAK sehingga tidak mempengaruhi capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPBATPP.

Berikut *screenshot* capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPBATPP pada aplikasi SIDAK Itjen KKP pada tahun 2025.



Sumber : Aplikasi SIDAK Itjen KKP

Gambar 2.5. Dashboard SIDAK BRPBATPP Tahun 2025

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPBATPP telah mencapai target, yaitu antara lain adalah:

1. Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Itjen KKP jelas sehingga dapat ditindaklanjuti;
2. Komitmen dari pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi dari tim Itjen KKP sebagai upaya untuk perbaikan kinerja organisasi;

3. Sistem pengawasan yang jelas dan transparan melalui aplikasi SIDAK, sehingga dapat memantau secara langsung terkait progres tindak lanjut dari rekomendasi;
4. Komunikasi lintas unit yang kuat untuk mempermudah penyelesaian temuan.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain: (1) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dari Aplikasi SIDAK; (2) Penyelenggaraan SPIP dan MR. Selain itu terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini, yaitu : (1) Memasukkan target pemantauan dokumen tindak lanjut pada SKP pegawai; (2) Membuat rekap rekomendasi Itjen KKP beserta berita acara tindak lanjut; (3) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui: (a) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP, dan (b) kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per triwulan di internal BRPBATPP.

3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran indikator kinerja ini melalui formulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu:

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (1) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (2) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; (3) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau (4) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan RI. Target IKPA BRPBATPP sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 adalah 92. Nilai IKPA final diperoleh setelah keseluruhan pengisian Indikator Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan semuanya. Nilai final biasanya akan didapat setelah GU nihil. Capaian nilai IKPA Tahun 2025 sebesar 98,09 atau persentase capaiannya sebesar 106,62%. Berikut *screenshot* nilai IKPA Tahun 2025 pada aplikasi OMSPAN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.28	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00	98.09	100%	0.00	98.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.09	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.64		99.99				100.00				

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan

Gambar 2.6. Nilai IKPA BRPBATPP Tahun 2025

Pada gambar di atas, dapat kita lihat perhitungan IKPA pada akhir tahun 2025 meliputi 7 indikator dan 3 aspek, sebagai berikut :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran : a. Revisi DIPA (10%), b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran : a. Penyerapan Anggaran (20%) b. Belanja Kontraktual (10%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran : a. Capaian Output (25%)

Nilai total pada form penilaian IKPA adalah sebesar 98,09 yang didapat dari penjumlahan nilai akhir setiap indikator pendukung pada masing-masing aspek. Sedangkan konversi bobot adalah sebesar 100% didapat dari bobot masing-masing setiap indikator pendukung pada masing-masing aspek.

Dari nilai total dan konversi bobot tersebut, kemudian didapatkan nilai IKPA BRPBATPP pada akhir Tahun 2025 adalah sebesar 98,09. Apabila dilihat dari 7 (tujuh) indikator pada perhitungan Nilai IKPA, maka indikator yang belum optimal nilainya adalah deviasi halaman III DIPA, sehingga menyebabkan capaian Nilai IKPA tahun 2025 belum optimal. Hal ini disebabkan karena realisasi penarikan dana per bulan tidak sama atau terdapat deviasi dari nilai rencana penarikan dana yang sudah dicantumkan di dalam DIPA.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk kedepannya dalam rangka memperbaiki nilai deviasi halaman III DIPA antara lain adalah : 1. Menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tahun 2026; 2. Melakukan revisi RPD pada halaman III DIPA tepat waktu sesuai dengan realisasi anggaran dan perubahan ROK per triwulan.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP dapat melampaui target antara lain adalah karena tercapainya aspek penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi OMSPAN yang terdiri dari:

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran Terdiri dari 2 indikator, yaitu: revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Pada aspek ini balai telah mendapat nilai 93,64;
2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran Terdiri dari 5 indikator, yaitu: penyerapan anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM. Pada aspek ini balai telah mendapa nilai 99,99;
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Terdiri dari 1 indikator, yaitu: Capaian Output. Pada aspek ini balai telah mendapa nilai 100,00 karena semua ouput telah tercapai.

Kegiatan penunjang keberhasilan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain adalah: 1. Revisi Anggaran; 2. Pengelolaan UP/TUP dan penyelesaian tagihan; 3. Penyusunan laporan keuangan; 4. Penyelenggaraan PIPK.

Selain itu terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini, yaitu monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui: (a) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP, dan (b) kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per triwulan di internal BRPBATPP.

4. Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP (Nilai)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Perhitungan nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Penilaian Mandiri SAKIP Level III lingkup BPPSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM. Kategori nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM KP yaitu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Kategori Nilai SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Permen PAN & RB Tahun 2021

BRPBATPP Bogor telah melakukan penilaian mandiri SAKIP Tahun 2025 Lingkup Pusluh KP yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 2-5 Juni 2025. Penilaian Mandiri dilaksanakan oleh tim internal BRPBATPP yang selanjutnya diverifikasi oleh tim evaluator dari Sekretariat BPPSDMKP. Setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya Tim Sekretariat BPPSDMKP menyusun Berita Acara Penilaian Mandiri dan Verifikasi Bukti Dukung SAKIP yang ditandatangani oleh Tim Sekretariat BPPSDM-KP, Tim Pusat Penyuluh Perikanan, dan Tim SAKIP BRPBATPP per tanggal 5 Juni 2025 dengan hasil nilai SAKIP sebagai berikut:

Tabel 2.21. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP Tahun 2025

No	Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	25,20	Apresiasi atas ketersediaan dokumen pengukuran kinerja setidaknya 5 tahun terakhir	Menjadikan budaya kinerja yang baik dan diimplementasikan dalam perencanaan kinerja secara berkala
2.	Pengukuran Kinerja	24,60	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen pengukuran kinerja setidaknya 5 tahun terakhir 2. Apresiasi atas upaya baru informasi dalam pengukuran kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi 3. Belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1. Menjadikan budaya kinerja yang baik dalam pengukuran kinerja 2. Implementasi upaya baru informasi dalam pengukuran kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi 3. Agar seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
3.	Pelaporan Kinerja	12,60	Apresiasi atas ketersediaan dokumen pelaporan kinerja setidaknya 5 tahun terakhir.	Menjadikan budaya kinerja yang baik dalam pelaporan kinerja.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,50	Apresiasi atas ketersediaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal selama > 2 tahun	Menjadikan budaya kinerja yang baik dalam evaluasi akuntabilitas kinerja
Total Nilai		82,90		
Predikat		A (Memuaskan)		

Hasil penilaian mandiri SAKIP tersebut juga disampaikan oleh Sekretariat BPPSDM KP melalui surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan No.B.4486/BRSDM.1/RC.510/VIII/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 3 lingkup BPPSDM. BRPBATPP Bogor telah melampaui target Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP pada tahun 2025 ini yaitu dari target 81 telah tercapai 82,90 atau sebesar 102,35%.

Meskipun indikator kinerja ini pada tahun 2025 telah melebihi target, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, maka indikator kinerja ini mengalami penurunan sebesar 0,25 (-0,30%). Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Capaian Nilai SAKIP tahun 2025 belum optimal dan terjadi penurunan nilai sebesar 0,25 poin dibandingkan tahun 2024;
2. Komponen yang turun adalah Pengukuran Kinerja yang disebabkan belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja (mempengaruhi penurunan nilai sebesar 1,50 poin).

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP BRPBATPP untuk kedepannya adalah:

- (1) Melakukan sosialisasi terkait SAKIP sebelum pengisian kuisioner SAKIP oleh pegawai lingkup BRPBATPP dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja untuk mengoptimalkan nilai SAKIP;
- (2) Melakukan upaya-upaya baru pada komponen-komponen pengukuran SAKIP baik itu komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- (3) Meningkatkan nilai kinerja organisasi.

Kegiatan penunjang keberhasilan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain adalah: (1) Penyusunan Perjanjian Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja; (2) Verifikasi dan validasi data kinerja; (3) Evaluasi rencana aksi; (4) Penyusunan laporan kinerja; (5) Penyiapan dokumen SAKIP; dan (6) Penilaian mandiri SAKIP.

Selain itu terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini, yaitu monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui: (a) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP, dan (b) kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per triwulan di internal BRPBATPP.

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang “Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan” dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang “Pedoman teknis pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran”. Nilai kinerja perencanaan anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori dalam penghitungan NKPA dibagi menjadi 5 (lima), yaitu (1) Sangat Baik, apabila NKPA > 90; (2) Baik, apabila NKPA > 80-90; (3) Cukup, apabila NKPA > 60-80; (4) Kurang, apabila NKPA > 50-60 dan (5) Sangat Kurang, apabila NKPA < 50.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Bobot untuk Capaian RO sebesar 75, bobot untuk Penggunaan SBK sebesar 10 dan bobot untuk Efisiensi SBK sebesar 15.

Data dukung untuk indikator kinerja ini adalah Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN No. 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal “Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025”. Berikut adalah *screenshot* Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu tahun 2025.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi Penggunaan SBK	Efisiensi Efisiensi SBK
1	032.12.403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Aplikasi Monev Kemenkeu, Tahun 2025

Gambar 2.7. *Screenshot* Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP pada Aplikasi Monev Kemenkeu Tahun 2025

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa NKPA BRPBATPP sudah melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100 dari target 71,5 atau sebesar 139,86% atau 120,00% pada aplikasi kinerjaku.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP dapat melampaui target pada tahun 2025 ini antara lain adalah tercapainya aspek penghitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada aplikasi SMART DJA yang terdiri dari:

1. Efektifitas yang berasal dari capaian RO dengan nilai: 100
2. Efisiensi yang berasal dari capaian penggunaan SBK dengan nilai 100 dan efisiensi SBK dengan nilai 100.

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah penyusunan laporan dari Aplikasi Monev Kemenkeu.

Selain itu terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini, yaitu : (1) Memasukkan target pengisian capaian output di aplikasi SAKTI pada SKP pegawai; (2) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per triwulan di internal BRPBATPP, monitoring capaian NKPA setiap bulan melalui aplikasi SMART DJA, monitoring pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI; (3) Melakukan koordinasi dengan KPPN Bogor terkait pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.

6. Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Sedangkan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah dengan cara menghitung indeks profesionalitas ASN dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin,

Target IP ASN sampai dengan akhir tahun 2025 adalah telah ditetapkan sebesar 81. Bukti dukung capaian akhir dari indikator kinerja ini adalah surat penyampaian hasil nilai IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP

Data dukung untuk indikator kinerja ini adalah Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDMKP No.62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal “Penyampaian Hasil Pengukuran IPASN Tahun 2025 lingkup BPPSDM”. BRPBATPP telah mencapai IP ASN sebesar 84,99 (104,93%) dari target 81.

Berikut *screenshot* capaian IP ASN BRPBATPP tahun 2025 pada aplikasi portal KKP. Meskipun capaian nilai IP ASN BRPBATPP telah melampaui target, namun beberapa pegawai masih memiliki nilai IP-ASN yang rendah. Hal ini terjadi karena belum melakukan pemutakhiran data maupun belum meningkatkan kompetensi diri. Untuk kedepannya, diharapkan setiap pegawai dapat mencapai target IP ASN dengan meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan, bimtek, dan sebagainya. Terlampir *screenshot* capaian IP ASN BRPBATPP TA. 2025 pada www.ropeg.kkp.go.id per tanggal 2 Januari 2026.



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN, BOGOR	506	22.04	88.16 %	32.96	82.4 %	25	83.33 %	5	100 %	84.99	TINGGI

Sumber : Dashboard IP ASN pada Portal KKP, tahun 2025

Gambar 2.8. *Screenshot* Capaian IP ASN BRPBATPP Tahun 2025

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP pada tahun 2025 dapat mencapai target antara lain adalah: (1) Telah terupdatenya data kompetensi pegawai lingkup BRPBATPP melalui aplikasi myASN; (2) Monitoring capaian IP ASN lingkup BRPBATPP yang dilaksanakan secara berkala yang disampaikan kepada pegawai melalui memo Kepala BRPBATPP; (3) Himbauan updating data kepegawaian melalui aplikasi MyASN kepada pegawai BRPBATPP melalui media apel pagi maupun rapat koordinasi lainnya.

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain: (1) Pemantauan data Indeks Profesionalitas ASN; (2) Penyusunan laporan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai.

Selain itu terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini, yaitu : (1) Memasukkan target IP ASN pada SKP pegawai; (2) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui : (a) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP, dan (b) kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per triwulan di internal BRPBATPP.

Meskipun indikator kinerja ini telah tercapai targetnya, namun terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk capaian indikator kinerja ini kedepannya. Pada dimensi kompetensi masih terdapat nilai diklat fungsional yang belum terpenuhi oleh pegawai JFT, diklat teknis yang belum terpenuhi oleh pegawai JFU dan diklat 20 JP yang belum terpenuhi oleh beberapa pegawai lingkup BRPBATPP sehingga nilai IP ASN belum optimal.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai IP ASN BRPBATPP kedepannya adalah dengan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Melakukan monitoring capaian IP ASN lingkup BRPBATPP secara berkala; (2) Menghimbau kepada pegawai untuk memenuhi data dukung diklat fungsional dengan sertifikat uji kompetensi atau penilaian kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan; (3) Menghimbau kepada pegawai JFU untuk memenuhi data dukung diklat teknis dengan sertifikat diklat teknis sesuai dengan jabatannya yang diselenggarakan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan; (4) Menghimbau seluruh pegawai agar memenuhi diklat 20JP dengan mengikuti bimbingan teknis/workshop/webinar/ sosialisasi yang diadakan oleh unit organisasi lingkup KKP maupun eksternal KKP.

7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBATPP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP.

Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya.

Formulasi perhitungan indikator ini adalah nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP dibagi dengan pagu pengadaan barang/jasa dikali 100%. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada tahun 2025 ini, capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP BRPBATPPP adalah sebesar 100% (125,00% atau 120,00% pada aplikasi kinerjaku) dari target 80%.

Data dukung capaian untuk indikator kinerja ini berupa Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa No.41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal “Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025”.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP BRPBATPP pada tahun 2025 dapat melampaui target adalah Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan barang / jasa BRPBATPP tahun 2025 sehingga tidak ada selisih pagu.

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain adalah: (1) Penginputan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan; (2) Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa; dan (3) Penginputan data realisasi pengadaan barang dan jasa.

8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBATPP (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan indikator kinerja dengan definisi suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula perhitungannya antara lain : (1) Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025 : a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%); (2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); (3) Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); (4) Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); (5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%); dan (6) Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).

Pada tahun 2025 ini, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBATPP adalah sebesar 97,50% (121,88% atau 120,00% pada aplikasi kinerjajaku) dari target 80%. Data dukung capaian untuk indikator kinerja ini berupa Nota Dinas Plt Plt. Sekretaris BPPSDM No.4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal “Capain IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025”.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBATPP pada tahun 2025 dapat melampaui target adalah: (1) Pimpinan berkomitmen dalam pengelolaan BMN di lingkup BRPBATPP; (2) Tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN lingkup BRPBATPP; (3) Sistem informasi yang terintegrasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi SAKTI, sehingga memudahkan penatausahaan dan inventarisasi BMN secara akurat; dan (4) Kecepatan dalam menindaklanjuti BMN yang rusak berat untuk dihapuskan, sehingga tidak membebani laporan aset.

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain adalah: (1) Penyusunan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN; (2) Penyusunan Usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN; (3) Penyusunan Laporan BMN; dan (4) Penyusunan RK BMN tahun 2027.

Selain itu terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya indikator kinerja ini, yaitu: (1) Memasukkan ke dalam SKP pegawai terkait dengan capaian komponen Pengelolaan BMN; (2) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui: (a) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP.

Meskipun indikator kinerja ini telah tercapai targetnya, namun terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk capaian indikator kinerja ini kedepannya. Capaian persentase Tingkat

Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBATPP di tahun 2025 belum optimal pada komponen pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL di tahun 2025.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBATPP kedepannya adalah dengan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Penyusunan RK BMN mengacu pada data pemeliharaan BMN pada Revisi RKAKL terakhir (jenis maupun volume BMN yang dipelihara) (2) Pada saat melakukan revisi anggaran untuk pemeliharaan BMN diupayakan yang direvisi adalah unit cost pemeliharaannya dan bukan volume BMN yang dipelihara.

9. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)

Layanan dukungan manajemen internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

Pengukuran indikator kinerja ini adalah melalui penghitungan :

- Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (ditandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.

Formula perhitungannya adalah jumlah realisasi dokumen hasil layanan dibagi jumlah target dokumen hasil layanan dikali 100%. Bukti capaian dari indikator kinerja ini adalah dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, *screenshot* aplikasi yang ditandatangani Pimpinan Satker.

Pada tahun 2025 ini, capaian indikator kinerja persentase layanan dukungan manajemen internal BRPBATPP adalah sebesar 100,00% (100,00%) dari target 100,00%. Dokumen layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Rekap Dokumen Pendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP Tahun 2025

No.	Nama Dokumen	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	Rekapitulasi data penilaian kinerja dan penilaian perilaku pegawai	4	4	100,00
2	Laporan Pemusnahan Arsip	1	1	100,00
3	Laporan Keuangan Audited 2024, Laporan Keuangan Semester 1 2025	2	2	100,00
4	Usulan RK BMN BRPBATPP TA 2027	1	1	100,00
5	Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) Tahunan 2024 dan Semester 1 2025	2	2	100,00
6	Laporan Pengendalian dan Pengawasan BMN (Semester 2 TA 2024, dan Semester 1 TA 2025)	2	2	100,00
7	Renstra Tahun 2025 - 2029	1	1	100,00
8	Perjanjian Kinerja	2	2	100,00
9	Dokumen Perencanaan Kinerja (Manual IKU, Rencana Aksi, dan Rincian Target)	2	2	100,00
10	DIPA RKAKL TA. 2026	2	2	100,00
11	Laporan e-monev Bappenas (Triwulan 4 TA 2024, Triwulan 1-3 TA 2025)	4	4	100,00
12	Laporan bulanan BRPBATPP	12	12	100,00
13	Laporan tahunan BRPBATPP	1	1	100,00
14	Evaluasi Rencana Aksi	4	4	100,00
15	Laporan kegiatan PPID per Triwulan	4	4	100,00
16	Rekapitulasi aktifitas publikasi	12	12	100,00
17	SOP Penyelenggaraan Penyuluhan	1	1	100,00
18	Laporan bulanan Lingkup Layanan Penyuluhan	12	12	100,00
19	Laporan triwulanan Lingkup Layanan Penyuluhan	4	4	100,00
20	Laporan tahunan Lingkup Layanan Penyuluhan	1	1	100,00
Jumlah Dokumen		74	74	100,00

Sampai dengan Bulan Desember 2025 realisasi indikator kinerja ini telah mencapai 100%. Seluruh dokumen sudah dipenuhi sebagai data dukung capaian indikator kinerja ini meskipun beberapa laporan bulanan terdapat keterlambatan dalam penyampaiannya. Diharapkan untuk kedepannya penyampaian laporan bulanan dapat dilakukan tepat waktu

sehingga tidak mengganggu proses penyusunan laporan bulanan maupun tahunan BRPBATPP.

2.4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Lingkup BRPBATPP

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 3 (tiga) instalasi, yaitu : (1) Instalasi Cijeruk; (2) Instalasi Cibalagung; dan (3) Instalasi Depok. Namun setelah tuisi riset berpindah ke BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), instalasi yang semula mendukung kegiatan riset balai beralih fungsi sesuai dengan tuisi balai yang baru. Instalasi diharapkan agar tetap dikelola dan dimanfaatkan sebagai aset Balai dalam rangka menghasilkan PNB. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengelola dan memanfaatkan aset yang ada di instalasi antara lain adalah :

a. Usaha Kelautan dan Perikanan

Pada kegiatan pelaksanaan usaha kelautan dan perikanan untuk masing-masing instalasi memiliki beberapa ikan yang menjadi koleksi, namun hanya beberapa ikan yang nantinya akan menjadi fokus produksi. Berikut beberapa koleksi ikan pada masing-masing instalasi lingkup BRPBATPP.

Tabel 2.239. Koleksi Ikan Air Tawar pada Instalasi Perikanan BRPBATPP Tahun 2025

No.	Jenis Ikan Lokal	Keterangan
Instalasi Perikanan Cibalagung		
1	Ikan Nila	Induk, benih
2	Ikan Mas	Induk, benih
Instalasi Perikanan Cijeruk		
1	Ikan kancra	Induk, benih
2	Ikan semah	Induk, benih
3	Ikan gariang	Induk, benih
4	Ikan baung	Induk
5	Ikan belida	Induk
6	Ikan beureum panon	Induk, benih
7	Ikan brek	Induk
8	Ikan tengadak	Induk, benih
9	Ikan lalawak	Induk
10	Ikan lais	Induk

No.	Jenis Ikan Lokal	Keterangan
11	Ikan nilem	Induk, benih
12	Ikan tawes	Induk, benih
13	Ikan gurame	Induk
14	Ikan jelawat	Induk
15	Ikan tapah	Induk
16	Ikan nila	Induk, benih
17	Ikan mas	Induk
Instalasi Perikanan Depok		
1	Ikan gurame	Benih
2	Ikan nila	Benih
3	Ikan lele	Benih

Sumber: Data berdasarkan data koleksi ikan air tawar tahun 2025

Berdasarkan jenis ikan koleksi yang dimiliki pada masing-masing UPT, selanjutnya dilakukan identifikasi dan penetapan jenis usaha di instalasi BRPBATPP seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Identifikasi dan Penetapan Jenis Usaha Budidaya Ikan Air Tawar pada Instalasi BRPBATPP Tahun 2025

Jenis Usaha Kelautan dan Perikanan pada Instalasi BRPBATPP		
Instalasi Perikanan Cibalagung		
Jenis Usaha		Keterangan
Budidaya Ikan Nila	Pembenihan, Pendederan dan Pembesaran	• Pembenihan dan pendederan jumlah produksi 98.000 ekor • Pembesaran jumlah produksi 812 kg
Budidaya Ikan Mas	Pembenihan, Pendederan dan Pembesaran	• Pembenihan dan pendederan jumlah produksi 10.000 ekor • Pembesaran jumlah produksi 72 kg
Instalasi Perikanan Cijeruk		
Jenis Usaha		Keterangan
Budidaya Ikan Dewa	Pembenihan	• Pembenihan, jumlah produksi 6.880 ekor, untuk restocking 1.000 ekor dan stok 1.000 ekor
Budidaya Ikan Nila	Pembenihan	• Pembenihan, jumlah produksi 42.000 ekor, untuk stok 10.000 ekor • Pembesaran, jumlah produksi 690 kg, untuk stok 590 kg
Budidaya ikan Mas	Pemeliharaan indukan	• Pembesaran, jumlah produksi 130 kg, untuk stok 100 kg

Jenis Usaha Kelautan dan Perikanan pada Instalasi BRPBATPP		
Kegiatan Pendukung		Keterangan
Konservasi ikan endemik	Tawes, nilem, beureum panon, brek, lalawak, tengadak, tapah, jelawat, tambakan	• Pada kegiatan konservasi ikan domestik, dilakukan pemijahan ikan nilem, beureum panon, tengadak dan tawes. Dari hasil pemijahan telah dihasilkan larva sampai bulan November, benih hasil pemijahan ikan tawes, nilem, beureum panon, lalawak dan tengadak telah didederkan di kolam pendederan. • Berpartisipasi pada Program Lingkar Desa yang digagas Makua. id dan KPS Tjimande dengan restocking benih ikan tawes sebanyak 5000 ekor yang dilepaskan di Situ Ciburung Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor • Berpartisipasi pada Kegiatan Hari Ikan Nasional bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dan Himpunan Alumni IPB dengan restocking 15.000 ekor ikan terdiri dari ikan Dewa, ikan Tawes, Ikan Tengadak, dan Ikan Nilem di Aliran Sungai Ciliwung Sempur Kota Bogor
Mina Eduwisata	Pembuatan/perbaikan sarpras pendukung eduwisata, kunjungan dari dinas daerah atau instansi pendidikan	Telah banyak kunjungan yang dilakukan baik dari kalangan pelajar maupun dari Instansi Pemerintah. Kunjungan yang dilakukan antara lain dari para pembudidaya, pengusaha, calon pensiunan BUMN, PT Iskol Agridaya, Dosen AUP Jakarta, Dosen Universitas Ibn Khaldun, CSR PT ANTAM Tbk Emas Pongkor, Dosen Politeknik Lampung, Anggota DPRD Ogan Komering Ulu Timur, Praktikum Lapang dari Mahasiswa dan Dosen Universitas Padjadjaran, Ikatan Darmawanita BRPBATPP dan anak-anak pegawai BRPBATPP, Dosen Universitas Negeri Lampung, Tim Peneliti dari BRIN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu, anggota DPRD Provinsi Banten, mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bantul, Wakil Bupati dan Ketua PKK Kabupaten Barito Kuala, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Guru SMK Negeri 2 Indramayu, anggota Asosisasi Tilapia Indonesia (ATI), dan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang
Pakan mandiri	Produksi untuk pemenuhan kebutuhan pakan di Instalasi Perikanan	Melakukan produksi pakan ikan berupa pelet apung dan pelet tenggelam dengan kadar protein 30%. Total pakan yang diproduksi selama periode Februari – Desember 2025 adalah 4.750 kg pakan tenggelam dan pakan apung

Jenis Usaha Kelautan dan Perikanan pada Instalasi BRPBATPP		
Pakan alami	Budidaya Kutu Air, <i>Azola sp.</i> dan <i>Lemna sp.</i>	Produksi pakan alami berupa kutu air (<i>dahnia/moina</i>), <i>Azola sp.</i> dan <i>Lemna sp.</i>
Instalasi Perikanan Depok		
Jenis Usaha		Keterangan
Budidaya Ikan Gurame	Pendederan	Penebaran telur gurame sebanyak 4.000 ekor
Budidaya Ikan Nila	Pendederan	Penebaran benih nila sebanyak 2.000 ekor
Budidaya Ikan Lele	Pendederan	Penebaran benih lele sebanyak 5.000 ekor

b. Tridharma Perguruan Tinggi

Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada instalasi BRPBATPP dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa praktik kerja lapangan peserta didik dan sebagai TEFA, penelitian peserta didik dan/atau dosen, serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan UPT.

BRPBATPP telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menerima peserta Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Akhir (PA), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Penelitian yang ditempatkan di Instalasi Perikanan milik BRPBATPP, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25. Peserta Tridharma Perguruan Tinggi (Magang/PKL/PA/MBKM/Penelitian) di Instalasi BRPBATPP Tahun 2025

NO.	LOKASI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH PESERTA
1	Instalasi Perikanan Cibalagung	27
2	Instalasi Perikanan Cijeruk	79
3	Instalasi Perikanan Depok	26

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa peserta yang melakukan magang/praktik di Instalasi Cibalagung berjumlah 27 orang yang terbagi atas penelitian 2 orang, PKL 14 orang, Praktik Akhir 3 orang, dan magang 8 orang. Peserta berasal dari IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Politeknik AUP Jakarta, dan SMKN 1 Kuningan.

Pada Instalasi Cijeruk jumlah peserta yang melakukan magang/PKL sebanyak 79 orang yang berasal dari Sekolah Vokasi IPB University, Universitas Sriwijaya, Universitas Riau, Universitas Padjajaran, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Universitas Tidar, Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Universitas Bangka Belitung, SMK

Negeri 1 Kuningan, Universitas Brawijaya, SMK Negeri 2 Indramayu, dan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang.

Sedangkan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Instalasi Depok diikuti oleh sebanyak 26 peserta dari Politeknik KP Sidoarjo. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan pengujian bakteri, pengujian PCR, pengujian histologi, dan pendampingan pengujian parasit dan jamur serta teknik pengambilan darah dan serum pada ikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025.



Gambar 2.9. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Magang/PKL/PA/MBKM/Penelitian) di Instalasi BRPBATPP Tahun 2025

c. Kegiatan Workshop

Pada tahun 2025, kegiatan workshop yang dilakukan di Instalasi Cijeruk sebanyak 8 kali. Workshop dilaksanakan dengan narasumber para teknisi di Instalasi Cijeruk dan penyuluh perikanan lingkup BPPSDM-KP. Peserta workshop adalah mahasiswa dan siswa magang dilingkup BRPBATPP dan pembudidaya di Kabupaten Bogor. Kegiatan workshop di Instalasi Cijeruk disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Kegiatan Workshop di Instalasi Cijeruk Tahun 2025

No	Judul Workshop	Tanggal	Narasumber	Jumlah Peserta
1.	Budidaya Ikan Dewa	5 Februari 2025	Teknisi Instalasi Cijeruk	12 Orang (7 mahasiswa Universitas Padjajaran dan 5 Taruna AUP Jakarta)
2.	Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Budidaya Lemna	27 Februari 2025	Teknisi Instalasi Cijeruk	11 orang (6 mahasiswa Universitas Tidar dan 5 Taruna AUP Jakarta)
3.	Sosial Ekonomi Perikanan	7 Maret 2025	Penyuluh Perikanan	7 orang (3 mahasiswa Universitas Tidar dan 4 Taruna AUP Jakarta)
4.	Pembuatan Pakan Ikan	23 Juli 2025	Teknisi Instalasi Cijeruk	14 orang (SMK Indramayu, Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Universitas Negeri Lampung, universitas Brawijaya, dan Universitas Padjadjaran)
5.	Budidaya Ikan Dewa	14 Agustus 2025	Teknisi Instalasi Cijeruk	Mahasiswa dan siswa magang
6.	Budidaya, Pakan dan Penyakit Ikan	28 Agustus 2025	PJ Instalasi dan Teknisi Cijeruk serta Penyuluh Perikanan	Pembudidaya kecamatan Cijeruk, Caringin, Cigombong, dan Ciawi
7.	Pembuatan Pakan	7 Oktober 2025	Teknisi Instalasi Cijeruk	20 orang (9 siswa SMK Negeri 1 Indramayu, 2 orang mahasiswa UPI Serang, dan 7 orang Taruni AUP Jakarta dan 2 orang Taruna AUP Cikaret)
8.	Teknologi Pembenihan Buatan pada Ikan Nilem	27 November 2025	Teknisi Instalasi Cijeruk	20 orang (14 Penyuluh Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, 2 orang mahasiswa UPI Serang, 3 orang mahasiswa AUP Jakarta, dan 1 orang teknisi program magang)

d. Kegiatan Percontohan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan di masing-masing instalasi lingkup BRPBATPP Bogor dilakukan oleh penyuluh perikanan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Berikut kegiatan percontohan penyuluhan pada kegiatan instalasi yang ada di BRPBATPP.

Tabel 2.27. Pelaksanaan Percontohan Penyuluhan BRPBATPP Tahun 2025

Kegiatan	Keterangan
Instalasi Cibalagung	
Bioflok	Pemeliharaan ikan Nila dengan metode Bioflok SIPANEN menggunakan Prebiomix, padat tebar maksimal adalah 80-90 ekor/meter kubik
Yumina Bumina	Yumina Bumina merupakan suatu usaha pemeliharaan ikan dengan memanfaatkan limbah sisa pakan dan kotoran ikan dalam suatu media pemeliharaan yang digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Yumina (Sayuran dan Ikan), sedangkan Bumina (Buah dan Ikan). Jenis-jenis ikan yang umum dipelihara dalam sistem Yumina Bumina adalah ikan Lele, ikan Nila Merah dan ikan Nila Hitam. Beberapa jenis sayuran yang dipelihara pada sistem Yumina bumina diantaranya kangkung, pakcoy, selada air, dan cabe.
Klinik Konsultasi / Kunjungan	Klinik konsultasi merupakan layanan informasi yang diberikan bagi masyarakat yang tertarik dalam hal usaha perikanan. Selain itu instalasi perikanan cibalagung pun menerima kunjungan bagi masyarakat yang ingin mengenal berbagai jenis dan sistem budidaya ikan air tawar, khususnya ikan Nila dan ikan mas. Saat ini instalasi perikanan cibalagung sudah menerima kunjungan yang datang baik secara individu maupun berkelompok, mulai dari sekolah, Dinas, Perguruan Tinggi, Pokdakan dan masyarakat umum.
Instalasi Perikanan Cijeruk dan Depok	
Klinik Konsultasi / Kunjungan	Klinik konsultasi merupakan layanan informasi yang diberikan bagi masyarakat yang tertarik dalam hal usaha perikanan. Selain itu Instalasi Perikanan Cijeruk pun menerima kunjungan bagi masyarakat yang ini belajar tentang budidaya perikanan, yang datang baik secara individu maupun berkelompok, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, dinas, pokdakan, DPRD dan juga masyarakat umum.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan percontohan penyuluhan dan kunjungan dari masyarakat maupun dinas untuk mencari informasi tentang budidaya ikan air tawar.



Gambar 2.10. Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Percontohan Penyuluhan di Instalasi BRPBATPP Tahun 2025



Gambar 2.10. Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Percontohan Penyuluhan di Instalasi BRPBATPP Tahun 2025 (Lanjutan)

Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di instalasi BRPBATPP seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.28.Rekap Permasalahan dan Rekomendasi pada Kegiatan Instalasi BRPBATPP Tahun 2025

No.	Permasalahan	Rekomendasi
Instalasi Perikanan Cibalagung		
1.	Suplai air untuk pemeliharaan ikan Nila dan Mas tergantung dari sumber inlet air, yaitu air sungai, sehingga suplai oksigen terlarut dalam kolam pemeliharaan tidak optimum dan nafsu makan ikan turun	Adanya penambahan sumber air yang baru
2.	Robuhnya jembatan yang menjadi akses ke area Timur menghambat proses pengangkutan ikan	Membuat jalan baru untuk akses langsung ke area Timur
Instalasi Perikanan Cijeruk		
1.	Curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada kesehatan ikan	Pemberian vitamin C dan E pada pakan ikan juga dilakukan agar daya tahan ikan budidaya meningkat
2.	Rusaknya peralatan akibat pemadaman arus listrik dan tidak stabilnya aliran listrik juga berdampak secara signifikan terutama menurunkan produktivitas pembenihan ikan	Dibaginya listrik instalasi agar tidak terjadi ledakan muatan listrik dan merusak peralatan di Instalasi bila terjadi ketidakstabilan listrik atau pemasangan stabilizer listrik.
3.	Kerusakan sarana prasarana di Instalasi Cijeruk mengakibatkan turunnya produktivitas budidaya ikan	koordinasi dengan bagian keuangan terkait realisasi anggaran, sehingga Instalasi Cijeruk bisa melakukan belanja untuk bahan dan jasa yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi ikan atau pengelolaan pabrik pakan
4.	Rusaknya alat uji kualitas air juga menjadi kendala dalam pendampingan mahasiswa dan siswa magang dalam pengambilan data laporan	Penggantian atau perbaikan alat uji parameter kualitas air
5.	Adanya komplek warga yang masih menyatu dengan Instalasi Cijeruk dan adanya jalan penghubung warga yang masih melewati areal Instalasi Cijeruk menyebabkan terganggunya proses budidaya ikan dan keamanan menjadi kurang efektif	Membuat pagar pembatas dengan warga, sehingga permasalahan keamanan aset menjadi lebih terjamin dan proses budidaya ikan bisa dilakukan tanpa terganggu

No.	Permasalahan	Rekomendasi
		aktifitas warga
Instalasi Perikanan Depok		
1.	Pemeliharaan alat alat laboratorium tidak menjadi prioritas utama	Berkoordinasi dengan Kepala BRPBATPP dan BPPSDM-KP terkait tugas dan fungsi laboratorium di Instalasi Depok
2.	Isolat bakteri yang merupakan aset BRPBATPP tidak semuanya bisa dilakukan peremajaan karena terbatasnya bahan kimia, <i>glassware</i> , <i>plasticware</i> dan SDM	Pengajuan bahan kimia, <i>glassware</i> dan <i>plasticware</i> yang memadai sehingga semua koleksi isolat bakteri dapat diremajakan kembali, minimal peremajaan untuk isolat yang harus diremajakan dalam kurun 1 tahun sekali untuk kemudian disimpan kembali dalam gliserol
3.	Air dalam gedung utama yang berwarna keruh dan bau karat; AC bocor; terdapat titik kebocoran pada gedung utama; pintu masuk lobi hampir keluar engsel	Melakukan koordinasi terkait perbaikan gedung, pengajuan perbaikan AC dan perbaikan instalasi saluran air

e. Kunjungan Kerja/Studi Tiru/Audiensi

BRPBATPP menerima kunjungan kerja/studi tiru/audiensi dari internal BPPSDMKP maupun dari berbagai instansi lain yang berasal dari Kabupaten/Kota dari luar Provinsi Jawa Barat. Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka melakukan studi banding terkait budi daya air tawar, terutama untuk ikan endemik yang dibudidayakan di instalasi riset Cibalagung maupun Cijeruk.

Beberapa kunjungan kerja/studi tiru/audiensi yang diterima oleh BRPBATPP selama tahun 2025 antara lain dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, DPRD Banten, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekolah Vokasi IPB, DPRD Ogan Komering Ulu Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, DPRD Provinsi Banten, Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Wakil Bupati dan Ketua PKK Kabupaten Barito Kuala, Peneliti BRIN, BPN, Dosen Politeknik Negeri Lampung, PT. Iskol Agridaya Internasional, pokdakan, dan masyarakat umum. Berikut dokumentasi terkait kegiatan kunjungan kerja/studi tiru/audiensi yang dilaksanakan pada tahun 2025 di BRPBATPP.



Gambar 2.11. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kerja/Studi Tiru/Audiensi Tahun 2025

2.5. Kegiatan Pelayanan Publik Lingkup BRPBATPP

a. Kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan/Prakerin

Salah satu kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BRPBATPP adalah kegiatan magang/Praktek Kerja Lapangan/Prakerin. Kegiatan menerima dan memfasilitasi para siswa/siswi (SMA/SMK) maupun mahasiswa untuk melaksanakan magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Akhir (PA), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan penelitian merupakan salah satu upaya BRPBATPP dalam menyebarkan teknologi budidaya air tawar serta menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kegiatan magang ini, penempatan lokasi peserta magang disesuaikan dengan judul/tema yang diambil. Adapun Lokasi kegiatan antara lain di BRPBATPP Sempur, Instalasi Cibalagung, Cijeruk, dan Depok. Berikut adalah rekapitulasi peserta Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian Tahun 2025 di BRPBATPP.

Tabel 2.29. Rekapitulasi Peserta Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian Tahun 2025 di BRPBATPP

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta (Orang)	%	Keterangan
1.	Magang	38	29,69	Peserta magang adalah 37 siswa/siswi Sekolah Menengah Kejuruan dan 1 orang masyarakat umum
2.	Praktek Kerja Lapang (PKL)	49	38,28	Peserta PKL adalah siswa/siswi Sekolah Menengah Kejuruan
3.	Praktik Akhir	3	2,34	Peserta praktik akhir adalah mahasiswa
4.	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	36	28,13	Peserta MBKM adalah mahasiswa
5.	Penelitian	2	1,56	Peserta penelitian adalah mahasiswa
	Jumlah	128	100,00	

Pada tabel diatas dapat dilihat total peserta yang mengikuti kegiatan Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian Tahun 2025 di BRPBATPP berjumlah 128 orang yang berasal dari 14 Perguruan Tinggi antara lain : (1) Politeknik Negeri Lampung, (2) Politeknik KP Sidoarjo, (3) Politeknik AUP, (4) Universitas Riau, (5) Universitas Diponegoro, (6) Universitas Padjadjaran, (7) Untidar, (8) Universitas Brawijaya, (9) Universitas Lampung, (10) Universitas Bangka Belitung, (11) Universitas Pakuan, (12) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), (13) Universitas Sriwijaya, dan (14) IPB University, 4 Sekolah Menengah Kejuruan antara lain : (1) SMK Pembangunan Bogor, (2) SMKN 1 Kuningan, (3) SMK Informatika CBI Sukabumi , (4) SMK Negeri 2 Indramayu, serta 1 peserta dari masyarakat umum.

Berikut dokumentasi kegiatan Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian Tahun 2025 di BRPBATPP.

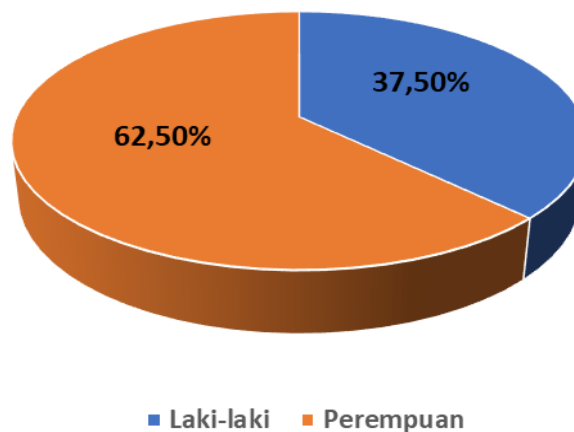


Gambar 2.12. Dokumentasi Kegiatan Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian Tahun 2025 di BRPBATPP



Gambar 2.12. Dokumentasi Kegiatan Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian Tahun 2025 di BRPBATPP (Lanjutan)

Dalam rangka penyediaan data terpilah untuk kegiatan PUG (Pengarus Utamaan Gender) di BRPBATPP, balai melakukan rekapitulasi terhadap gender peserta magang selama tahun 2025. Hasil rekapitulasi jumlah peserta Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian berdasarkan gender pada tahun 2025 terdiri dari 48 orang laki-laki (37,50%) dan 80 orang perempuan (62,50%). Berdasarkan persentase tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian telah memberikan ruang partisipasi yang signifikan bagi perempuan. Berikut adalah diagram yang menunjukkan persentase jumlah peserta Magang / PKL / Praktik Akhir / MBKM / Penelitian di BRPBATPP selama tahun 2025.



Gambar 2.13. Persentase Jumlah Peserta Magang/Praktik Berdasarkan Gender Tahun 2025

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan PPID berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPID BRPBATPP merupakan unit layanan informasi publik di bawah PPID Unit Kerja Eselon I BPPSDMKP. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID BRPBATPP bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BRPBATPP.

PPID BRPBATPP semakin menyadari dan berkomitmen bahwa keterbukaan informasi publik dalam lingkup instansi pemerintah adalah prinsip yang mendasari hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki atau dikelola oleh BRPBATPP.

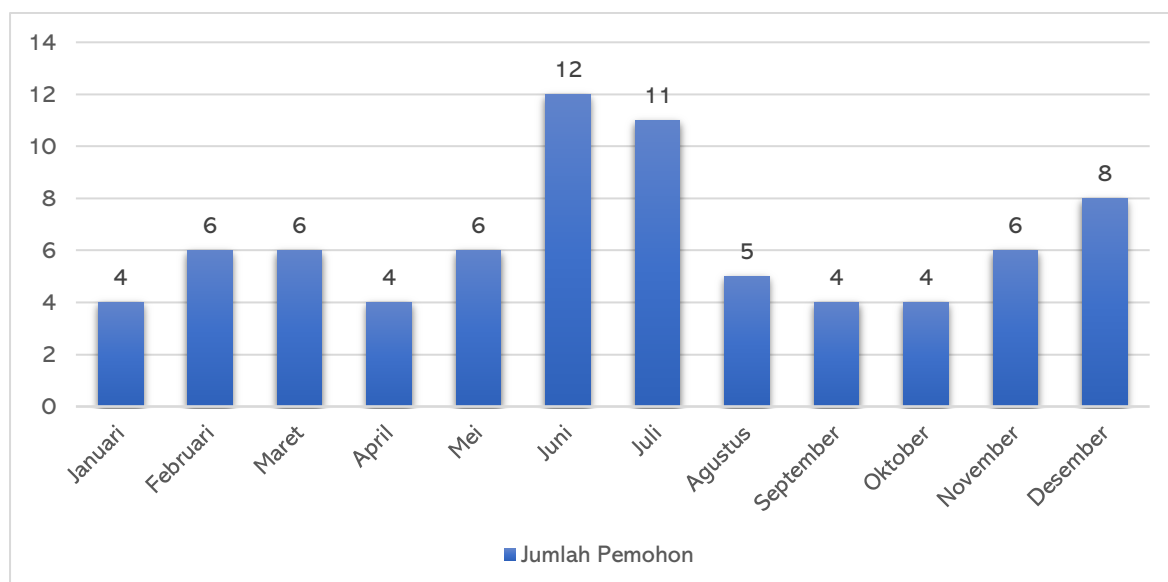
Capaian layanan informasi publik yang dilakukan pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2025 berjumlah 76 pemohon dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.30. Rekapitulasi Jenis Informasi Publik dan Jumlah Pemohon ke PPID BRPBATPP Tahun 2025

No	Jenis Informasi Publik	Jumlah Pemohon	Persentase (%)
1	Budidaya ikan air tawar (ikan nila, lele, gurame, Dewa)	23	30,26
2	Teknik budidaya sistem bioflok, bioflok sipanen, dan kincir	6	7,89
3	Informasi induk ikan air tawar bersertifikasi dan bibit ikan nila unggul	2	2,63
4	Model bisnis budidaya ikan air tawar	1	1,32
5	Domestikasi ikan dan pengembangan spesial lokal	1	1,32
6	Budidaya, pengolahan dan pemasaran Ikan Lele dan Ikan Nila	1	1,32
7	Mekanisme permohonan tempat magang/PKL/penelitian siswa maupun mahasiswa	25	32,89
8	Survei kegiatan project by learning yang rencana akan dilakukan di BRPBATPP	1	1,32
9	Program magang kerja dan Pelaksanaan Pelatihan	2	2,63
11	Mekanisme registrasi "dekomposer" untuk budidaya ikan	1	1,32
12	Profil dan kegiatan Instalasi Riset Plasma Nutfah dan Perikanan Air Tawar	1	1,32
13	Narasumber dan tempat kunjungan pelatihan/bimtek budidaya ikan air tawar/ikan nila	2	2,63
14	Informasi program dan kegiatan BRPBATPP	1	1,32
15	Sinkronisasi program kerja dengan Penyuluh Perikanan dan Pemerintah Daerah	1	1,32

No	Jenis Informasi Publik	Jumlah Pemohon	Persentase (%)
16	Pendampingan penyuluh perikanan Kota Bogor	1	1,32
17	Peran Penyuluh Perikanan dan Cara Pembuatan KUSUKA	2	2,63
18	Keadaan dan kegiatan di Instalasi Cijeruk	1	1,32
19	Data dan kondisi BMN Instalasi Cijeruk	1	1,32
20	Aktivitas dan kebutuhan alat laboratorium di BRPBATPP	3	3,95
Jumlah		76	100,00

Jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2025 cukup bervariasi. Jumlah permohonan informasi publik yang paling banyak terdapat di bulan Juni, yaitu sejumlah 12 permohonan. Selanjutnya diikuti oleh bulan Juli sejumlah 11 permohonan, dan bulan Desember sebanyak 8 permohonan. Sedangkan jumlah permohonan pada bulan lainnya berkisar antara 4 sampai dengan 6 permohonan. Berikut adalah grafik jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2025.



Gambar 2.14. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik di BRPBATPP Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan KKP, maka KKP menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP Tahun 2025 melalui rangkaian tahapan dengan menggunakan indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah: 1) Mengukur kepatuhan PPID Eselon I/UPT dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, 2) Menilai konsistensi PPID Eselon I/UPT

memberikan layanan informasi publik, 3) Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik, 4) Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi PPID Eselon I/UPT, dan 5) Memberikan masukan (*feedback*) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Eselon I/UPT.

c. Publikasi

Publikasi adalah informasi yang dirancang untuk memperlihatkan, memperkenalkan, mempertahankan nama dan kehormatan seseorang, kelompok, atau suatu organisasi kepada khalayak dalam suatu konteks tertentu melalui media dengan tujuan untuk menciptakan daya tarik khalayak.

Kegiatan suatu instansi/lembaga selayaknya disebarluaskan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui layanan publikasi. Dalam hal ini, tujuan dari layanan publikasi adalah mempermudah suatu instansi/lembaga dalam menyebarkan informasi, dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika organisasi.

Selama tahun 2025, BRPBATPP melakukan publikasi kegiatan melalui media X, Facebook, Instagram, TikTok, dan Youtube. Konten yang diunggah berupa berita kegiatan BRPBATPP, #SemangKa, retweet/repost BPPSDMKP, dan narasi tunggal BPPSDMKP serta KKP. Penyebarluasan kegiatan Penyuluhan KP dan lingkup BRPBATPP pada tahun 2025 sebanyak 638 seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31. Rekapitulasi Publikasi BRPBATPP Tahun 2025

No.	Jenis Konten	Jumlah Unggahan
1	Konten Berita	227
2	Konten informasi	151
3	Konten narasi Tunggal BPPSDMKP/KKP	93
4	Konten <i>repost/retweet</i>	166

Sumber : Data diolah dari data publikasi BRPBATPP tahun 2025

2.6. Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Lingkup BRPBATPP

Pengelolaan kearsipan merupakan prosedur terencana untuk mengelola seluruh siklus hidup dokumen dalam suatu organisasi secara sistematis. Kegiatan pengelolaan kearsipan di BRPBATPP

meliputi pengawasan kearsipan internal, penataan arsip, penilaian arsip usul musnah, penilaian arsip usul serah, dan pemusnahan arsip.

a. Pengelolaan Kearsipan Internal

Setiap tahun KKP melaksanakan audit sistem kearsipan internal di lingkungan KKP pada seluruh unit kerja selaku Unit Pengolah. Tujuan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal adalah untuk menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan.

KKP mengapresiasi satker dan UPT yang memperoleh nilai tinggi dalam pengawasan kearsipan tahun 2024 dengan memberikan penghargaan. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada di Ballroom KKP pada 2 Juli 2025. BRPBATPP berhasil meraih peringkat kesatu UPT lingkup KKP dalam ajang penghargaan kearsipan lingkup KKP tahun 2024 dengan perolehan nilai 99,37 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya diperoleh BRPBATPP dalam kegiatan pengawasan kearsipan lingkup KKP dua tahun berturut-turut.

Adapun untuk penilaian kearsipan internal yang dilakukan pada tahun 2025, BRPBATPP memperoleh nilai sebesar 94,66 dengan predikat sangat memuaskan. Berikut dokumentasi pemberian penghargaan kearsipan lingkup KKP pada tahun 2025.



Gambar 2.15. Pemberian Penghargaan Kearsipan Lingkup KKP kepada BRPBATPP

b. Penataan Arsip

Penataan arsip inaktif bertujuan untuk memudahkan penemuan/pencairan kembali arsip apabila diperlukan; memberi kepastian bahwa arsip yang disimpan dan dipelihara adalah penting bagi penentuan kebijakan, pengambilan keputusan dan informasi, serta menghentikan akumulasi atau penumpukan arsip yang tidak perlu.

Kegiatan mengelola dan menata arsip inaktif dilaksanakan dengan Langkah-langkah antara lain melakukan pemilahan antara arsip dan non arsip, melakukan identifikasi dan pemberkasan/pengelompokan arsip serta penyusunan daftar arsip.

c. Penilaian Arsip Usul Musnah

Penyusutan ditujukan terhadap arsip-arsip yang jangka waktu penyimpanan atau retensinya telah habis. Arsip yang telah disisihkan berdasarkan jangka waktu retensinya, harus diadakan penilaian kembali untuk dapat menentukan arsip-arsip mana yang dapat dimusnahkan. Penilaian arsip adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan nasib akhir arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Penilaian Arsip Usul Musnah yang ditunjuk.

Pada 13 November 2025, Tim Penilai Arsip BRPBATPP bersama Biro Umum dan PBJ KKP serta Sekretariat BPPSDMKP melaksanakan penilaian arsip usul musnah di lingkungan BRPBATPP dengan menyepakati arsip yang diusulkan musnah merupakan arsip kegiatan penyuluhan; ketentuan penulisan jenis arsip dan klasifikasi tahun arsip. Setelah melalui proses klasifikasi dan verifikasi, Tim Penilai Arsip menyetujui bahwa jumlah arsip yang akan diusulkan musnah adalah sebanyak 379 jenis.



Gambar 2.16. Rapat Penilaian Arsip Usul Musnah dan Usul Serah serta Pemeriksaan Arsip Usul Musnah Tahun 2025

d. Penilaian Arsip Usul Serah

Tujuan penilaian daftar arsip usul serah untuk menyeleksi dan menilai daftar arsip usul serah yang telah dinyatakan habis masa retensinya dan atau berketerangan dipermanenkan dan mengetahui/memastikan nilai kesejarahan arsip.

BRPBATPP perlu menyerahkan arsip statis dalam rangka menjamin keselamatan arsip yang bernilai guna dan sebagai bahan pertanggungjawaban organisasi dan pertanggungjawaban nasional; mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi serta menghemat penggunaan prasarana dan sarana penyimpanan arsip.

Pada 13 November 2025, Tim Penilai Arsip BRPBATPP bersama Biro Umum dan PBJ KKP serta Sekretariat BPPSDM melaksanakan penilaian arsip usul serah di lingkungan BRPBATPP. Jumlah arsip BRPBATPP yang diusulkan untuk diserahkan ke ANRI semula berjumlah 43 jilid, namun berdasarkan hasil penilaian menjadi 25 jilid.



Gambar 2.17. Pemeriksaan Arsip Usul Serah BRPBATPP Tahun 2025

e. Pemusnahan Arsip

Kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan BRPBATPP sebagai Unit Kearsipan III bertujuan untuk menghancurkan secara fisik arsip yang sudah tidak lagi memiliki nilai guna, baik dari segi administratif, hukum, keuangan, maupun sejarah.

Arsip BRPBATPP yang dimusnahkan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pemusnahan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Dikelola oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada BRPBATPP.

Kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan BRPBATPP Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 dimulai pukul 10.00 WIB. Kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan BRPBATPP tahun 2025 dilaksanakan di PT. Putraduta Buanasentosa (Indoarsip) yang berlokasi di Jalan Tanjung Nomor 1 Kawasan Industri Multiguna II, Sukaresmi, Cikarang, Jawa Barat. Para saksi kegiatan pemusnahan mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi zoom meeting.



Gambar 2.18. Pemusnahan Arsip BRPBATPP Tahun 2025



PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

3.1. Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait pencapaian output BRPBATPP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Masih terdapat format atau outline profil kelompok yang belum sesuai dengan surat Kepala Pusat Penyuluhan KP No. B.714/ BPPSDM.2/RSDM.530/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 perihal "Kodifikasi Nomor Registrasi dan Profil";
- b) Capaian Nilai IKPA tahun 2025 belum optimal yang disebabkan oleh turunnya nilai indikator deviasi halaman III DIPA tahun 2025;
- c) Capaian Nilai SAKIP tahun 2025 belum optimal dan terjadi penurunan nilai sebesar 0,25 poin dibandingkan tahun 2024. Komponen yang turun adalah Pengukuran Kinerja yang disebabkan belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja (mempengaruhi penurunan nilai sebesar 1,50 poin);
- d) Pada dimensi kompetensi masih terdapat nilai diklat fungsional yang belum terpenuhi oleh pegawai JFT, diklat teknis yang belum terpenuhi oleh pegawai JFU dan diklat 20 JP yang belum terpenuhi oleh beberapa pegawai lingkup BRPBATPP sehingga nilai IP ASN belum optimal;
- e) Capaian persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBATPP di tahun 2025 belum optimal pada komponen pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL di tahun 2025.

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi berdasarkan permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penyampaian kembali format atau outline profil kelompok kepada penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP melalui surat atau melalui kegiatan pendampingan oleh tim kerja penyuluhan perikanan baik secara luring maupun daring.
- b) Menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tahun 2026 dan melakukan revisi RPD pada

halaman III DIPA tepat waktu sesuai dengan realisasi anggaran dan perubahan ROK per triwulan

- c) Melakukan sosialisasi terkait SAKIP sebelum pengisian kuisioner SAKIP oleh pegawai lingkup BRPBATPP dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja untuk mengoptimalkan nilai SAKIP, melakukan upaya-upaya baru pada komponen-komponen pengukuran SAKIP baik itu komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal, serta meningkatkan nilai kinerja organisasi.
- d) Melakukan monitoring capaian IP ASN lingkup BRPBATPP secara berkala, menghimbau kepada pegawai untuk memenuhi data dukung diklat fungsional dengan sertifikat uji kompetensi atau penilaian kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan, menghimbau kepada pegawai JFU untuk memenuhi data dukung diklat teknis dengan sertifikat diklat teknis sesuai dengan jabatannya yang diselenggarakan oleh pihak berwenang sesuai ketentuan, serta menghimbau seluruh pegawai agar memenuhi diklat 20JP dengan mengikuti bimbingan teknis/workshop/webinar/ sosialisasi yang diadakan oleh unit organisasi lingkup KKP maupun eksternal KKP.
- e) Penyusunan RK BMN mengacu pada data pemeliharaan BMN pada Revisi RKAKL terakhir (jenis maupun volume BMN yang dipelihara), dan pada saat melakukan revisi anggaran untuk pemeliharaan BMN diupayakan yang direvisi adalah unit cost pemeliharaannya dan bukan volume BMN yang dipelihara.

PENUTUP

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sebagai yang menaungi penyuluh perikanan wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memiliki visi “Mewujudkan BRPBATPP menjadi *Center of Excellent* Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Untuk itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan harus semakin memperkuat perikanan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai dengan misi yang diembannya.

Pelaporan kegiatan tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BRPBATPP sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai unit kerja yang mempunyai keinginan untuk membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah ini sehingga capaian kinerja dari setiap unit kerja dibawah BRPBATPP ini tidak hanya menjadi laporan saja, namun diharapkan benar-benar dapat memberikan dampak serta dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Pada akhirnya laporan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pimpinan, dapat menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki kinerja balai untuk tahun berikutnya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan di BRPBATPP kedepannya.